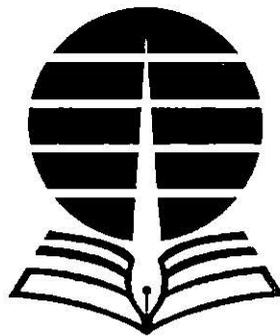


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes)**

**(Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014 Tentang
Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi)**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SIGIT IMAM MULIA, S.IP

NIM. 500645361

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDeS) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi)

Sigit Imam Mulia, S.IP
sigitimammulia1@gmail.com

Program pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk lembaga ekonomi desa yang dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan kesepakatan pada musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD serta berbagai kalangan masyarakat. Tujuan pembentukan BUMDes beberapa diantaranya adalah untuk pengelolaan potensi desa, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes juga dapat membuka lapangan pekerjaan dari unit usaha yang dijalankan. Salah satu desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah mendirikan BUMDes adalah Desa Amin Jaya yaitu BUMDes Karya Jaya Abadi. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan BUMDes di Desa Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat serta untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat di dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara (*interview*), Pengamatan (*observasi*), dan Dokumentasi untuk dapat menganalisis implementasi kebijakan BUMDes. BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya telah memiliki unit-unit usaha yang dikelola yang mempunyai data dan informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh keterangan dari responden. Teknik analisis data yang menggunakan teknis analisis kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana, yaitu 1) Kondensasi data, 2) Display data, dan 3) Penarikan kesimpulan/Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi dari kebijakan BUMDes Karya Jaya Abadi di Desa Amin Jaya telah sesuai dengan yang diharapkan karena memberikan kontribusi sesuai dengan tujuan pendiriannya baik itu mempercepat pembangunan desa, meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa serta mengelola potensi desa. Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa ada dua variabel yang mempengaruhi, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Sedangkan faktor yang mendukung implementasi kebijakan BUMDes, yaitu 1) Adanya potensi desa, 2) Peran pemerintah desa dan 3) Sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun faktor penghambat, yaitu 1) Rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes dan 2) Minimnya akses permodalan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Desa

ABSTRACT**THE IMPLEMENTATION OF POLICY IN VILLAGE BUSINESS
INSTITUTION (BUMDes)
(A Study of Amin Jaya Village Rules No 2 in Year Of 2014 About Village
Business Institution)**

Sigit Imam Mulia, S.IP
sigitnita87@gmail.com

Post-Graduate School Program
Universitas Terbuka

The law No 6 in year of 2014 about the village, it gave the autonomy to the village to make the economic of village institution that was named Village Business Institution (BUMDes). The establishment of Village Business Institution was done based on the deal of the village conference which was attended by the village government, BPD and also the people around. The goals of establishment the BUMDes, they were like to manage the potentials of village, to increase the economic business of the society, and also to increase the real income of village. The BUMDes was also able to give the job vacancy from the business item that was obtained. One of the villages in West Kotawaringin that was established the BUMDes was Amin Jaya Village, it was Karya Jaya Abadi Village Business Institution. The goals of this research was to know the implementation of the policy in Village Business Institution on Amin Jaya Village, District of West Kotawaringin, and also to know the factors that supported and obstructed in its implementing. This Research used the Qualitative Descriptive research method. The technique of collecting the data that was used in this research were interview, observation, and documentation so that could analyze the implementation of Policy Village Business Institution (BUMDes). The Village Business Institution of Karya Jaya Abadi in Amin Jaya Village had the business units that was managed to have the data and informations that was needed to reach the informations of respondents. The technique of analyzing the data used Qualitative analyzing technique Miles model, Huberman and Saldana, such as 1) Condensation of data, 2) Data Display, and 3) Making the summary/verification. The result of this research showed that the implementation of Karya Jaya Abadi Village Business Institution Policy in Amin Jaya was suitable with the expectation because it gave the contribution based on the purpose established, increasing the economic business of village society, and also managing the village potentials. In the process of Implementing the Village Business Institution (BUMDes), there were two variables that affected, they are like content of policy and context of implementation. While, the supporting factors in implementing the policy of BUMDes are like 1) There were Village Potentials, 2) The role of village government, and 3) The adequating of facilities and infrastructures. The obstacle factor, they are like 1) low levels of education board in BUMdes, and 2) The lack of access to capital.

Keywords: Policy of Implementation, Village Business Institution, Village Government

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul " IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi)"

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalan Bun, Oktober 2016

Yang Menyatakan



Sigit Imam Mulia, S.IP
NIM. 500645361

LEMBAR PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi)"

Penyusun TAPM

Nama : Sigit Imam Mulia, S.IP
NIM : 500645361
UPBJJ : Palangka Raya
Program Study : Magister Administrasi Publik
Hari / Tanggal : Minggu, 27 November 2016

Menyetujui :

Pembimbing II

Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ed.D
NIP. 19620803 198903 2 002

Pembimbing I

DR. R. Biroum B, M.Si
NIDN. 1123086902

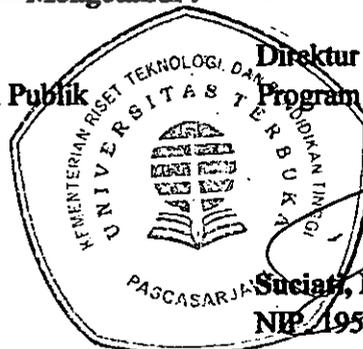
Penguji Ahli

Prof. DR. Sangkala, M.Si
NIP. 1963 1111 1991 03 1 002

Mengetahui :

**Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik**

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



**Direktur
Program Pascasarjana**

Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Sigit Imam Mulia, S.IP
NIM : 500645361
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi)"

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu / 27 November 2016
W a k t u : 13.30-15.00 WIB
 Dan telah dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :

Suciati, M.Sc., PhD



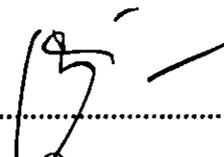
Penguji Ahli :

Prof. DR. Sangkala, M.Si



Pembimbing I :

DR. R. Biroum B, M.Si



Pembimbing II :

Ir. Ida Zubaidah, M.A.,Ed.D



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, PondokCabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp.021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama : Sigit Imam Mulia, S.IP

NIM : 500645361

Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 02 Juni 1987

Registrasi Pertama :

Riwayat Pendidikan : 1. Lulus Sekolah Dasar Negeri Sidorejo 1
Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1999
2. Lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
Negeri 1 Pangkalan Bun Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
pada Tahun 2002.
3. Lulus SMA Negeri 1 Pangkalan Bun Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
pada Tahun 2005.
4. Lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN), Jatinangor Provinsi Jawa Barat pada
Tahun 2009.

Riwayat Pekerjaan : 1. Tahun 2007 s/d 2008 Calon Pegawai Negeri Sipil
di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Tahun 2008 s/d 2016, Pegawai Negeri Sipil Pada
Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng
Kabupaten Kotawaringin Barat

Alamat Tetap : Jalan Padat Karya No. 84 RT. 03 Kelurahan
Sidorejo Pangkalan Bun Kode Pos 74111.

No. Telp. / HP. : 0812-5141-9877.

Palangka Raya, Oktober 2016



SIGIT IMAM MULIA, S.IP
NIM. 500645361

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), dengan judul tesis “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 2 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi).

Tujuan penyusunan tesis ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelas Magister Administrasi Publik program pasca sarjana pada Universitas Terbuka.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. DR. Raden Biroum, B., M.Si selaku Pembimbing I, Yth. Ir. Ida Zubaidah, M.A.,Ed.D selaku Pembimbing II, dan Ibu DR. Johanna B. S. Pantow, M. Appl, Kepala UPBJJ Palangka Raya beserta seluruh jajaran Universitas Terbuka UPBJJ Palangka Raya, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan penyusunan tesis untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yth. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Yth. Ibu DR. Johanna B.S. Pantow, M. App. L. Selaku Ketua Bidang Ilmu Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka;

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Sangkala, M.Si, selaku Penguji Ahli Pascasarjana Universitas Terbuka;
4. yang sangat dicintai isteri dan yang teramat disayangi anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
5. Semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian penulisan TAPM ini.
6. Yang sangat dicintai isteri dan yang teramat disayangi anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;
7. Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan, atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebbaikannya dan mendapat ganjaran yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, saran dan kritik yang sifatnya penyempurnaan sangat diharapkan

Pangkalan Bun, Oktober 2016

Penulis

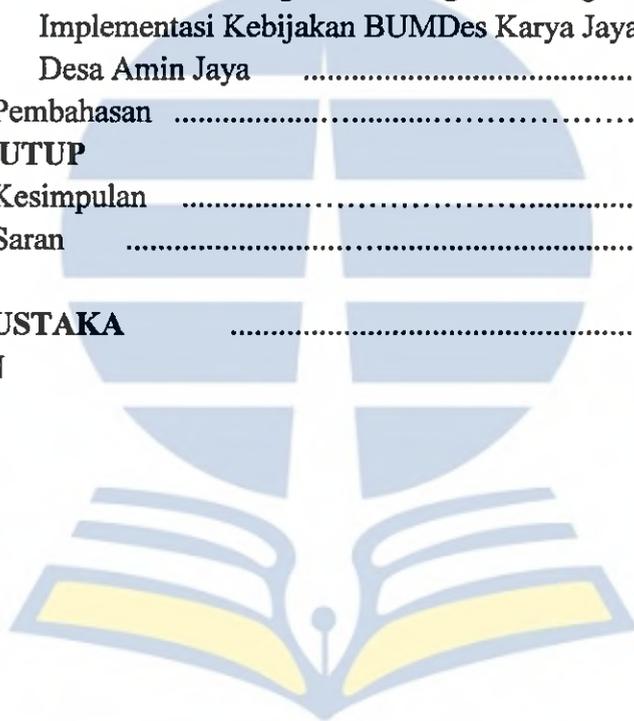


SIGIT IMAM MULIA
NIM. 500645361

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Abstrak | i |
| Lembar Pernyataan Orisinalitas TAPM | iii |
| Lembar Persetujuan TAPM | iv |
| Lembar Pengesahan TAPM | v |
| Daftar Riwayat Hidup | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi | ix |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Gambar | xii |
| Daftar Lampiran | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 8 |
| 1. Identifikasi Masalah | 8 |
| 2. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| 1. Kegunaan Teoritis | 10 |
| 2. Kegunaan Praktis | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 11 |
| 1. Konsep Kebijakan Publik | 11 |
| 2. Konsep Implementasi Kebijakan | 16 |
| 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan | 18 |
| B. Penelitian Terdahulu | 21 |
| C. Kerangka Konseptual | 28 |
| D. Operasionalisasi Konsep | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian | 34 |
| B. Sumber Informasi dan Lokus Penelitian | 35 |
| 1. Sumber Informasi | 35 |
| 2. Lokus Penelitian | 36 |

| | |
|--|-----|
| C. Instrumen Penelitian | 38 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 39 |
| E. Metode Analisis Data | 42 |
| BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 47 |
| 1. Gambaran Umum Desa Amin Jaya | 47 |
| 2. Gambaran Umum BUMDes | 52 |
| B. Hasil Penelitian | 59 |
| 1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes | 59 |
| 2. BUMDes Karya Jaya Abadi | 65 |
| 3. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya | 84 |
| C. Pembahasan | 92 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA | 108 |
| LAMPIRAN | |



DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| Tabel 2.1 | Penelitian Terdahulu | 24 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Desa Amin Jaya Berdasarkan Persebaran tiap RT | 50 |
| Tabel 4.2 | Sarana Dan Prasarana Desa | 51 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Alokasi Dana Transfer Bagi Desa d Kecamatan Pangkalan Banteng | 61 |
| Tabel 4.4 | Kontribusi BUMDes terhadap PAD Desa Amin Jaya | 69 |
| Tabel 4.5 | Keadaan Pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi Berdasarkan Tingkat Pedidikan | 74 |
| Tabel 4.6 | Daftar Harga Buah Sawit Per 11 Oktober 2016 | 79 |
| Tabel 4.7 | Laporan Laba/Rugi BUMDes Karya Jaya Abadi Per September 2016 | 84 |
| Tabel 4.8 | Permodalan BUMDes Yang Bersumber dari Pemerintah Desa Amin Jaya | 88 |
| Tabel 4.9 | Daftar Inventaris Barang BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng | 90 |



DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|---|------------|
| Gambar 2.1 Gambar Kerangka Konseptual | 30 |
| Gambar 4.1 Struktur BUMDes Karya Jaya Abadi | 73 |



DAFTAR LAMPIRAN**Halaman**

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Data BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah saat ini adalah membangun daerah pinggiran yaitu pedesaan yang dapat tercapai melalui memberdayakan masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dengan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi desa dan mengoptimalkan potensi yang ada bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya yaitu memberikan peluang bagi daerah pedesaan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika di tingkat provinsi memiliki perekonomian yang baik. Kemajuan ekonomi di suatu provinsi juga akan tercapai apabila ekonomi kabupatennya juga baik. Bergitu pula kemajuan kabupaten akan tercapai apabila ditopang dengan perekonomian desa yang kuat dan akan berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya kemajuan di tingkat desa maka penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan kebijakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. pembangunan pedesaan lah merupakan salah satu cara dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan harapan baru, tidak hanya bagi pemerintahan desa tapi juga masyarakatnya. Salah satu tujuan disahkannya UU tentang Desa ini adalah

menjadikan desa menjadi lebih mandiri, tidak hanya sekedar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saja tetapi juga dalam pengelolaan keuangan dan potensi desa. Masyarakat dan kelembagaannya diakui sebagai elemen penting dalam penentuan masa depan desa itu sendiri. Pelaksanaan demokrasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa memiliki ruang yang cukup untuk dijalankan secara optimal melalui UU ini.

Melalui UU desa ini diharapkan pembangunan di desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta mampu menanggulangi kemiskinan. Ketiga harapan tersebut dapat ditempuh melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan .

Kesan yang kuat dalam pembentukan UU Desa ini adalah keinginan pemerintah untuk menjadikan kelembagaan desa yang lebih maju salah satunya dari aspek ekonomi. Dalam rangka pembangunan aspek ekonomi tersebut yaitu dengan mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa yang dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes bukanlah hal yang baru dalam peraturan pemerintahan desa, namun pada aspek kemandirian UU Desa memberikan penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses suatu proses yang digerakkan oleh pemerintah desa dengan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Sebelumnya BUMDes telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1,

tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Disebutkan juga bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDES dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES. Berbagai kebijakan tersebut menandakan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan BUMDES. Kepemilikan lembaga BUMDES ini dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUMDes yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUMDes disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pengelolaan BUMDes dengan menyesuaikan UU No 6 Tahun 2014 telah dikeluarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Pada Permendes ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan dan budaya setempat.

BUMDes yang merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal yang secara langsung berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset dan segala potensi desa yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes dirancang dengan mengedepankan peran dari Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih efektif dan proporsional. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah-langkah yang strategis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Di samping itu, perlunya memperhatikan potensi lokal serta dukungan kebijakan pemerintah di atasnya untuk mengantisipasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat upaya untuk menjadikan desa sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMDes telah berjalan dengan menerbitkan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUMDes yang telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut diharapkan Pemerintah Desa dapat memahami tentang pembentukan dan pengelolaan potensi desa yang ada melalui BUMDes sehingga dapat dijadikan roda penggerak perekonomian masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai perwujudan dalam skala pembangunan nasional

Kabupaten Kotawaringin Barat yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 6 Kecamatan 9 Kelurahan dan 81 Desa. Saat ini jumlah Desa yang telah mendirikan BUMDes sebanyak 29 yang salah satunya adalah Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng. BUMDes di Desa Amin Jaya telah terbentuk sejak Tahun 2014 yang bernama BUMDes KARYA JAYA ABADI yang terdiri dari 3 (tiga) unit usaha, yaitu Pembuatan Paving Jalan, Jual Beli Buah Kelapa Sawit dan Taylor (menjahit).

Adapun tujuan didirikannya BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya yang dituangkan dalam Peraturan Desa No. 02 Tahun 2014 tentang BUMDes Karya Jaya Abadi adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang dikelola oleh unit-unit usaha BUMDes. Dengan adanya BUMDes di Desa Amin Jaya diharapkan dapat mengakomodir berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat untuk dapat lebih berkembang dan

tidak menjadi pesaing terhadap kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat desa.

BUMDes Karya Jaya Abadi yang berada di Wilayah Desa Amin Jaya Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan BUMDes pertama yang berdiri di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. BUMDes Karya Jaya Abadi merupakan satu-satunya BUMDes yang mewakili Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengikuti Lomba BUMDes terbaik tingkat nasional pada tahun 2016 ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. BUMDes Karya Jaya Abadi juga telah berkontribusi kepada PAD Desa. Sedangkan BUMDes yang lain masih dalam tahap penataan dan baru dibentuk oleh Pemerintahan Desanya.

BUMDes Karya Jaya Abadi juga saat ini merupakan inspiratif bagi desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng. Ada beberapa Kepala Desa dan pengelola BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng yang baru saja mendirikan BUMDes berkunjung ke Desa Amin Jaya untuk belajar dan mencari inspirasi untuk menjalan unit-unit usaha dalam mengelola potensi desanya masing-masing.

Desa Amin Jaya yang merupakan salah satu desa yang dikelilingi oleh tiga Perusahaan Besar Swasta yang bergerak di perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Indotruba, PT. Wana Sawit Subur Lestari dan PT. Bangun Jaya Alam Permai. Karena wilayahnya dikelilingi oleh ketiga perusahaan tersebut sehingga mayoritas mata pencahariaannya adalah petani kebun kelapa sawit sehingga menjadi potensi desa yang dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perusahaan besar kelapa sawit yang berada di Desa

Amin Jaya dan merupakan salah satu potensi desa yang dimiliki BUMDes Karya Jaya Abadi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan besar tersebut dalam rangka membantu para petani sawit untuk dapat menjual hasil kebunnya ke pihak perusahaan sehingga harga jual buah kelapa sawit dapat terkendali dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud.

Namun dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya pengembangan usaha yang telah dilakukan oleh pengurus BUMDes ini masih sangat minim, yaitu diantaranya :

1. Minimnya jumlah tonase TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang masuk ke BUMDes yaitu kurang lebih 300 ton berdasarkan laporan bulanan BUMDes.
2. Minimnya Pendapatan Asli Desa (PAD) yang di dapat dari bagi hasil keuntungan BUMDes.
3. Adanya salah satu unit usaha yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi yaitu unit pengelolaan jalan kebun desa.

Pada umumnya pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah (mayoritas SLTA). Hal ini mengakibatkan pengurus tersebut belum dapat mengelola usahanya dengan baik, kurangnya kemampuan dalam pembukuan dan akuntansi keuangan yang baik, begitu juga kemampuan manajerial usahanya.

Untuk meningkatkan pemberdayaan BUMDes, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui pembinaan BUMDes. Oleh karena itu peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator perlu terus ditingkatkan. Namun demikian saat ini pelaksanaan pembinaan serta pendampingan yang berkesinambungan

terhadap pengelolaan BUMDes di Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya BUMDes Karya Jaya Abadi masih belum optimal sehingga berdampak terhadap perkembangan usaha BUMDes.

Perkembangan usaha BUMDes Karya Jaya Abadi sangat dipengaruhi oleh kemampuan di bidang permodalan. Saat ini BUMDes Karya Jaya Abadi hanya mendapatkan akses permodalan dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes dan belum memiliki akses permodalan melalui pihak perbankan yang dikarenakan belum adanya aset BUMDes sebagai jaminan.

Berdasarkan fenomena di atas menarik perhatian untuk diteliti dan dapat menemukan informasi tentang upaya pengembangan ekonomi masyarakat. Upaya yang telah dilakukan oleh Desa yang diantaranya Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan menggali segala potensi-potensi sektor unggulan Desa Amin Jaya dijadikan sebagai modal dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berskala desa. Pembentukan Badan Usaha Mlik Desa merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk menggali secara optimal potensi desa untuk mewujudkan kemandirian desa. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti : **“IMPELEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA” (Studi Peraturan Desa Amin Jaya No. 02 Tahun 2014 Tentang BUMDes Karya Jaya Abadi).**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Memperhatikan berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Tingkat partisipasi masyarakat desa Amin Jaya dalam turut serta mengembangkan usaha BUMDes yang belum efektif.
 2. PAD Desa Amin Jaya dari sektor Bagi Hasil BUMDes yang masih minim.
 3. Kurangnya akses permodalan bagi BUMDes Karya Jaya Abadi.
 4. Kurang optimalnya peran dari Pengurus BUMDes dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes.
 5. Minimnya peran dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap para pengurus BUMDes.
 6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha BUMDes
 7. Rendahnya tingkat pendidikan pengurus BUMDes.
2. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memfokuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan BUMDes.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan BUMDes di seluruh Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penyelenggaraan BUMDes.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang pengelolaan unit usaha BUMDes dan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain

2. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi peneliti penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- 2) Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah baik pemerintah desa, daerah maupun pusat dalam pengambilan kebijakan, terutama menyangkut program Pendirian BUMDes di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*Policy*) pada prinsipnya didefinisikan cukup beragam tergantung para ahli dengan berbagai macam pengertiannya. Menurut Cart J. Friedrich dalam Hosio (2007:2) kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan, atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu

Sedangkan menurut Solichin dalam Waluyo (2007:44) kebijakan merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan masalah atau persoalan tertentu. Selanjutnya ia juga memberikan definisi kebijakan sebagai “segala apa yang dilakukan pemerintah atau tidak dilaksanakan pemerintah atau apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat di sini merupakan seluruh kepentingan yang penting dari perpaduan pendapat, keinginan dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang

mempunyai tujuan, nilai-nilai praktek-praktek yang terarah, dimana dilaksanakan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan untuk memecahkan permasalahan.

Kebijakan publik menurut Rist dalam Muluk (2008:11) yaitu berkaitan dengan siklus kebijakan, yakni formulasi, imlementasi dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan Rosenbloom dalam Muluk (2008:11) kebijakan publik justru lebih menitikberatkan pada dua hal yakni analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan. Analisis kebijakan lebih memusatkan perhatian pada output kebijakan dan dampak kebijakan. Pendekatan manajerial dalam evaluasi kebijakan lebih menitik beratkan pada efektivitas kebijakan, efektivitas biaya, dan ekonomi.

William N. Dunn (1999) dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik menyatakan bahwa "Kebijakan Publik (*Public Policy*) merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan korelatif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah". Kebijakan Publik seperti yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pelbagai pilihan kolektif yang saling ketergantungan satu sama lain, termasuk di dalam keputusannya untuk melakukan tindakan. Kebijakan tersebut dibuat oleh badan atau pemerintah. Dan apabila suatu kebijakan sudah ditetapkan maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memberdayakan sumber daya finansial dan manusia.

Sedangkan Carl Friedrich (1969) pada buku Leo Agustino yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:7) mengatakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Dalam pembuatan suatu kebijakan sebaiknya berdasarkan dari hasil suatu analisis kebijakan publik yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Menurut Winarno (2007) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan, antara lain :

- a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- b. Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang kebijakan yang berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Dalam merumuskan suatu kebijakan menurut Dunn (1999), ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dibahas. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak untuk mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) biasa disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Isu kebijakan seringkali muncul karena adanya silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan berkaitan dengan karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi dari suatu kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan dari suatu masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan terhadap masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan

kebijakan masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai suatu kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi merupakan upaya untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur dengan kedaulatan rakyat, warga negara yang akan mengikuti arahan pemerintah. Melalui proses ini orang akan belajar untuk mendukung pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap ini suatu kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari tahapan kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup dari pelbagai substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilaksanakan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan pelbagai masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Konsep Implementasi Kebijakan

Banyak persepsi menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah bagian terpisahkan dari perencanaan kebijakan, padahal keduanya merupakan satu kesatuan yang saling memberikan dukungan demi terwujudnya keberhasilan proses tersebut. Suatu kebijakan yang telah disahkan dan siap untuk dilaksanakan nantinya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan dilaksanakan ketika sebuah kebijakan ditetapkan dengan tujuan yang jelas. Dalam konteks kebijakan, implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi ketetapan dalam sebuah kebijakan.

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif dalam pemecahan masalah harus diimplementasikan yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001) mengatakan : "Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dimaksud dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini termasuk salah satu upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil diamanatkan oleh keputusan kebijakan".

Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001) menjelaskan bahwa implementasi menekankan pada suatu tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk

mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut minimal tiga hal, yaitu : adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan serta adanya hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino (2008) bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (Output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuang-tujuang yang diharapkan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan wajib diimplementasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Dunn. W. N (1999:24-25) mengatakan bahwa setiap tahapan proses kebijakan publik, termasuk dalam tahapan implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa kebijakan tersebut. Dalam analisa di sini tidak identik dengan evaluasi, karena dari tahapan penyusunan rancangan hingga evaluasi sudah harus dilakukan analisa. Ungkapan Dunn yang terkenal adalah lebih baik perumusan masalah publik benar tapi pelaksanaan salah daripada perumusan masalah keliru tapi pelaksanaannya benar.

Selanjutnya dikemukakan oleh Charler O'Jone (Harahap, 2004:15) mengemukakan bahwa "Implementasi adalah suatu proses interaksi antara

suatu perangkat tujuan dengan tindakan atau bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijaksanaan yang mendahuluinya dengan kata lain implementasi merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan pilar-pilar organisasi, interpretasi dan pelaksanaan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Subarsono, 2005:94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Edwards III dalam Subarsono (2005) mengemukakan ada empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Komunikasi

Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan rumit. Dari sisi sumber informasi yang berbeda juga

akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

b. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard*

operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Keberhasilan dari implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Grindle (Subarsono, 2005:93) implementasi dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation)

- 1) Variabel isi kebijakan, mencakup :
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
 - b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan;
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan;
 - e. Pelaksana program dan sumber daya yang dikerahkan.
- 2) Variabel lingkungan implementasi, mencakup :
 - a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
 - b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa;
 - c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi

di antara para aktor implementasi, serta kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Dari berbagai teori telah diuraikan di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan yang dibuat, maka penulis menganalisis mempergunakan teori Grindle yang dikarenakan menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dari suatu kebijakan memiliki kemiripan dengan obyek penelitian.

B. Penelitian Terdahulu

Penggalian dari wacana penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya memperjelas mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Secara umum kajian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah mempublikasikan kepada beberapa jurnal cetakan dan jurnal online.

- a. Subhan Goma (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolang Itang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Mongondow Utara”. Adapun variabelnya adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan. Hasil penelitiannya adalah peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa Bolangitang Satu.

- b. Puguh Budiono (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedung primpen Kecamatan Kanor”. Variabel dalam penelitian ini adalah Konten Kebijakan (isi) dan Konteks kebijakan (lingkungan). Hasil penelitian Konten Kebijakan (isi) dan Konteks kebijakan (lingkungan) sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan di desa yang dalam hal ini implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa.
- c. Helmei Willy Amanda (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kaupaten Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes unit BPAM di Desa Ketapanrame Kecamatan trawas Kabupaten Mojokerto. Dan Hasil Penelitiannya adalah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada unit Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan sebagai strategi pembangunan desa berjalan baik.
- d. Yuni Syahara Rahma Dewi dan Meirinawati (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) di Desa Sareng Kecamatan

Geger Kabupaten Madiun). Variabel penelitian ini adalah tujuan, sasaran, lingkup, koordinasi, arus komunikasi, tempat prakarsa, dan indikator prestasi. Hasil penelitiannya yaitu tujuan, penetapan, sasaran yang sesuai, menyesuaikan lingkup masyarakat, adanya koordinasi yang kondusif, arus komunikasi persuasif yang akurat dan tersedianya tempat prakarsa yang memadai dan tercapai indikator prestasi.

- e. Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul”. Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Variabel yang digunakan adalah Dampak Kesehatan, Dampak Ekonomi dan Dampak Pembangunan Lingkungan. Hasil penelitiannya bahwa Bumdes Karangejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Bumdes Karangejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa juga semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes.

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

| NO | TOPIK | METODE | TUJUAN PENELITIAN | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|------------|---|--|--|---|
| 1 | Subhan Goma, 2015 Jurnal Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan di Desa Bolang Itang Satu Kecamatan Bolang Itang Kabupaten Mongondow Utara. | Kualitatif | Untuk mengetahui peran pemerintah desa Bolangitang Satu dalam peningkatkan pendapatan desa, melalui pembentukan badan usaha milik desa. | Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan desa belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya kebijakan dari pemerintah desa secara konkrit yaitu peraturan desa yang memuat tentang pembentukan badan usaha milik desa serta pengelolaannya yang masih belum transparan dan akuntabel sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan pendapatan di desa Bolang Itang Satu. | Membahas kebijakan dari pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa | Penelitian Subhan Goma lebih mengarah kepada peran Kepala Desa dalam mengambil suatu kebijakan untuk meningkatkan pendapatan di desa melalui kebijakan Badan Usaha Milik Desa. Sedangkan penelitian dilakukan difokuskan pelaksanaan kebijakan program BUMDes terhadap peningkatan pendapatan desa dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. |
| 2 | Puguh Budiono, 2015 Jurnal Implementasi Kebijakan | Kualitatif | Untuk mengetahui penyebab atau apa saja yang mempengaruhi hasil | Konten Kebijakan (isi) dan Konteks kebijakan (lingkungan) sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu | Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Badan Usaha Milik | Penelitian Puguh Budiono lebih ke arah kepada faktor-faktor yang mempengaruhi |

| NO | TOPIK | METODE | TUJUAN PENELITIAN | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|------------|---|--|---|---|
| | Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitudu dan Desa Kedung primpem Kecamatan Kanor | | implementasi kebijakan tersebut. | kebijakan di desa yang dalam hal ini implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa. | Desa | implementasi kebijakan dengan teori Grindle, sedangkan penelitian ini lebih menyeluruh terhadap pelaksanaan program BUMDes. |
| 3 | Helmei Willy Amanda (2015) dengan judul Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada Badan Pengelola Air Minum | Kualitatif | mendeskripsikan strategi pembangunan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDes unit BPAM di Desa Ketapanrame Kecamatan trawas Kabupaten Mojokerto | Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada unit Badan Pengelola Air Minum (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebagai strategi pembangunan desa telah berjalan baik. | Membahas peran dari Badan Usaha Milik Desa sebagai suatu strategi terhadap peningkatan pembangunan di desa. | Penelitian Helmei Willy Amanda lebih terfokus kepada strategi Pemerintah Desa untuk meningkatkan PAD Desa melalui BUMDes, sedangkan penelitian ini lebih ke arah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BUMDes. |

| NO | TOPIK | METODE | TUJUAN PENELITIAN | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|------------|--|--|---|--|
| | (BPAM) di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kaupaten Mojokerto | | | | | |
| 4 | Yuni Syahara Rahma Dewi dan Meirinawati (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian | Kualitatif | Mendeskripsikan strategi pembangunan desa dalam mengentaskan kemiskinan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada unit PUAP di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. | Bahwa pelaksanaan pengelolaan PUAP dibawah naungan BUMDes sebagai strategi pembangunan desa berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan terdahulu (GAPOKTAN) | Membahas strategi dari pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat | Penelitian Yuni Syahara Rahma Dewi dan Meirinawati membahas satu unit usaha BUMDes yaitu PUAP sedangkan penelitian ini membahas keseluruhan dari unit-unit usaha BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. |

| NO | TOPIK | METODE | TUJUAN PENELITIAN | HASIL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|------------|--|--|---|---|
| | (PUAP) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) | | | | | |
| 5 | Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul". | Kualitatif | Untuk mengetahui dan memahami dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul | Bumdes Karangejek telah berhasil memberi dampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Bumdes Karangejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa juga semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDes. | Membahas Kebijakan Badan Usaha Milik Desa untuk peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. | Penelitian Dantika Ovi Era Tama dan Yanuardi, M.Si membahas tentang dampak yang dihasilkan dari kebijakan BUMDes, sedangkan penelitian ini membahas lebih ke arah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan BUMDes. |

C. Kerangka Konseptual

Implementasi merupakan suatu keputusan untuk mencapai sasaran tertentu, maka untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut diperlukan serangkaian aktivitas pelaksanaannya. Mengingat bahwa implementasi suatu program merupakan suatu hal yang kompleks karena banyaknya faktor yang saling mempengaruhi dan terkait, maka untuk memahami adanya perbedaan antara apa yang diharapkan tercapai dengan yang terjadi kemudian menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya studi-studi implelementasi.

Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Syukur Abdullah (1988), yaitu:

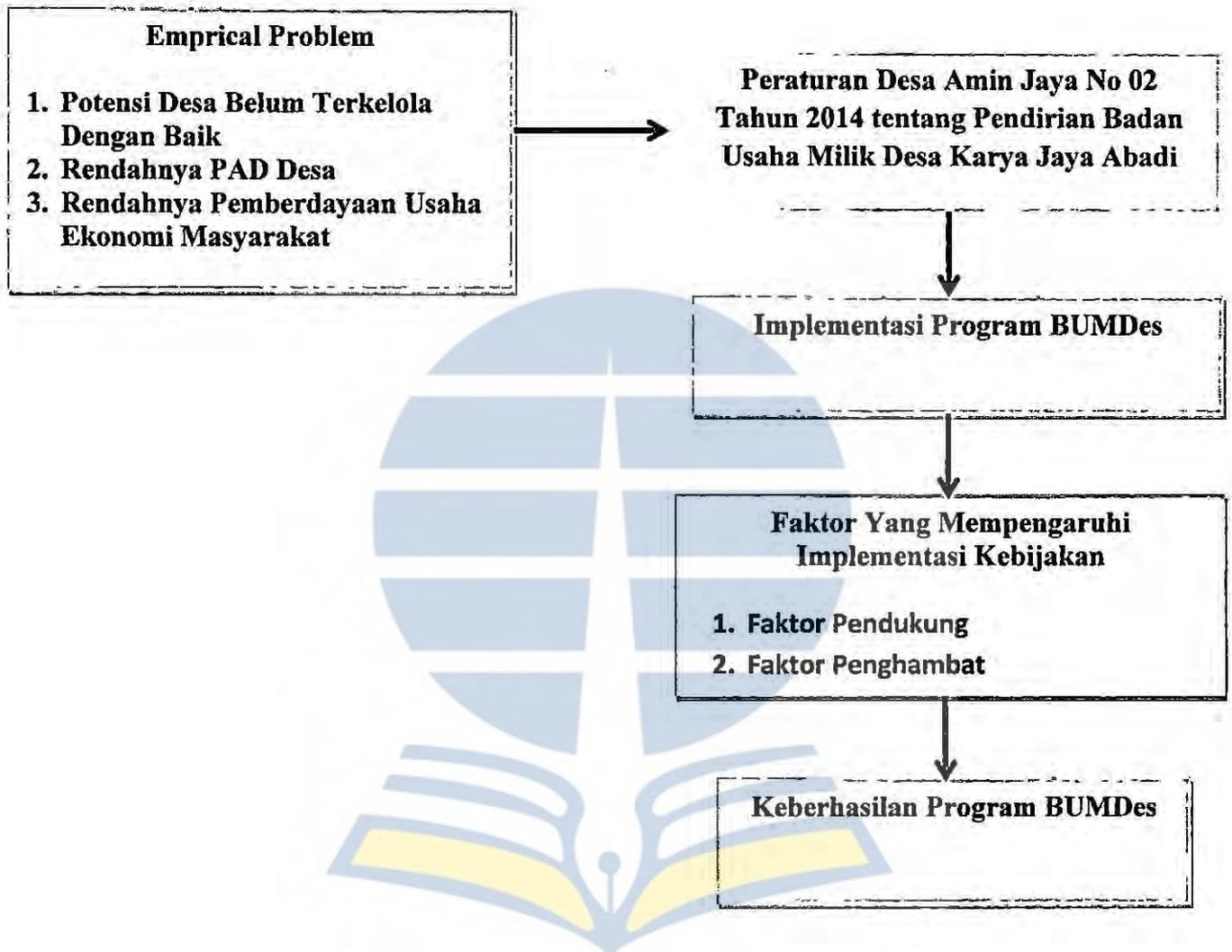
- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima mamfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
- c. Unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Untuk melihat sampai mana keberhasilan implementasi kebijakan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Dengan alasan tersebut, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model Merilee S. Grindle. Model tersebut mengulas bahwa keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan ditentukan oleh dua variabel, yaitu :

- 1) Variabel isi kebijakan, mencakup :
 - a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan;
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan;
 - e. Pelaksana program;
 - f. Sumber daya yang dikerahkan.
- 2) Variabel lingkungan implementasi, mencakup :
- a. Seberapa besar kekuasaan,kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
 - b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa;
 - c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Penyelenggaraan program pendirian BUMDes di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan suatu inovasi yang sangat baik. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Dan untuk saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengeluarkan aturan bahwa Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat melakukan penyertaan modal awal sebesar 20 % dari total nilai APBDes. Hal ini menjadi angin segar bagi seluruh BUMDes yang telah berdiri untuk dapat melebarkan sayap usaha untuk menggali seluruh potensi desa secara optimal demi terciptanya kesejahteraan masyarakat pedesaan dan tercapainya nawacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia dengan membangun Indonesia dari daerah pinggiran.



Gambar I. Kerangka konseptual

D. Operasionalisasi Konsep

Perumusan definisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan definisi konsep. Definisi operasional sering disebut sebagai proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Dari berbagai model yang dikemukakan oleh para ahli, model implementasi kebijakan yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa dengan teori Grindle. Dalam teori yang dikemukakan Grindle ada dua variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi.

1) Variabel isi kebijakan, mencakup :

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;

Indikator ini menyatakan bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan tersebut berpengaruh terhadap implementasinya. Hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut. Jenis manfaat yang dihasilkan;

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan;

Dalam setiap kebijakan pasti memiliki target atau tujuan yang hendak dicapai. Pada indikator ini yang ingin disampaikan adalah bahwa sampai sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas

d. Kedudukan pembuat kebijakan;

Pembuat kebijakan dalam pemutusan sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan terletak pada pucuk pimpinan, yang diuraikan secara jelas kepada para pelaksana dari kebijakan yang diambil sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan didukung dengan sumber daya yang memadai.

e. Pelaksana program;

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang berkompeten dan sesuai bidangnya demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumber daya yang dikerahkan.

Apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan secara umum meliputi : jumlah personil yang didukung dengan kompetensi dasar pendidikan dan ketrampilan, jumlah sarana dan prasarana, besaran pembiayaan serta mekanisme kerja secara jelas.

2) Variabel lingkungan implementasi, mencakup :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;

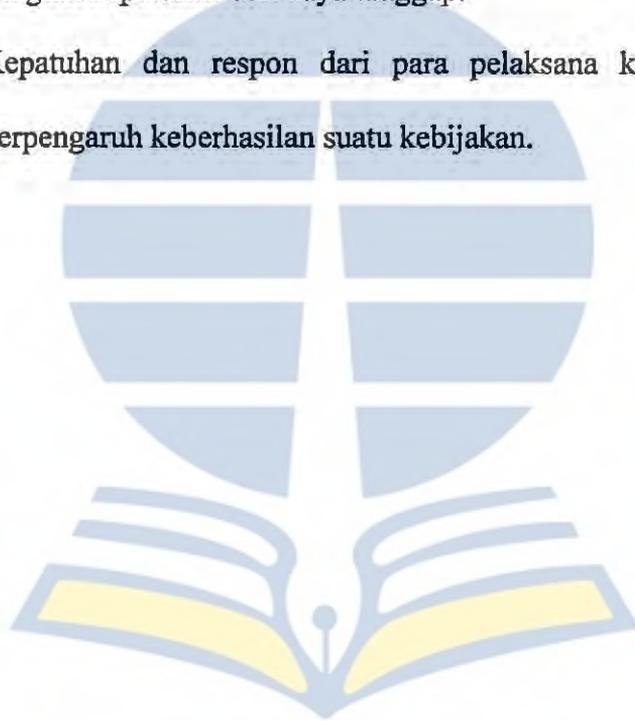
Dalam suatu kebijakan perlu mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan serta strategi yang digunakan oleh para pelaksana yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan.

b. Karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa;

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka karakteristik dari suatu institusi yang berkuasa juga turut mempengaruhi dalam implementasi kebijakan.

c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap.

Kepatuhan dan respon dari para pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh keberhasilan suatu kebijakan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mendirikan BUMDes. Obyek penelitian yang dijadikan pokok bahasan penelitian memiliki karakteristik yang rumit dan dinamis mengingat setiap kebijakan dibuat tidak lepas dari faktor aktor pelaku kebijakan dan lingkungan organisasi tempat pelaksanaan kebijakan. Untuk itu memerlukan suatu metode penelitian yang mampu membaca kebijakan tersebut. Metode penelitian kualitatif selalu berangkat dari fenomena-fenomena sosial yang di tangkap oleh peneliti, hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif gejala sosial dan fenomena sudah cukup menjadi syarat dalam penentuan masalah penelitian (Bungin, 2010).

Dasar pemikiran tersebut maka penulis menentukan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tepat untuk mendalami fenomena tersebut, karena untuk mengungkap tentang suatu fenomena yang terjadi, tidak hanya didasarkan pada fakta empirik yang bersifat obyektif, tetapi lebih banyak di dasarkan pada situasi subyektif yang melatarbelakangi mengapa suatu fenomena tersebut bisa terjadi.

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif, alur peristiwa secara kronologis dapat diikuti serta dapat menilai sebab akibat dari lingkup pikiran orang-orang yang terlibat didalamnya. Data kualitatif lebih dapat membimbing memperoleh penemuan-penemuan yang tak

diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru. Data kualitatif dapat membantu melangkah lebih jauh dari praduga-praduga dan kerangka kerja awal.

B. Sumber Informasi dan Lokus Penelitian

1. Sumber Informasi

Untuk dapat memberikan data yang tepat dan akurat maka perlu ditetapkan sumber-sumber data yaitu seseorang yang bertindak sebagai informan yang sesuai untuk dijadikan atau dipilih sebagai sumber untuk memperoleh data atau informasi yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Adapun jenis datanya adalah:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber – sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 2000;132). Dalam penelitian ini data primer dihimpun secara langsung dari responden atau informan melalui wawancara. Responden yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah orang yang mampu memberikan data/informasi tentang upaya yang dilakukan agar BUMDes dapat beroperasi dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan.

b. Data Sekunder

Amirin (2000 : 132) mengemukakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya tetapi melalui sumber lain. Adapun sumber data yang

digunakan sebagai bahan acuan guna pengolahan data dan mendeskripsikan kejadian yang telah berlangsung secara tertulis antara lain :

a. Arsip dan Dokumen

Peneliti mengambil data atau bahan dari beberapa sumber resmi, antara lain; Surat Keputusan, Surat Edaran, Perundang-undangan, laporan, dokumen, dan naskah-naskah penting lainnya.

b. Eksplorasi Internet

Data dan bahan dalam penelitian ini juga diambil dari akses internet yang berasal dari bermacam sumber yang membahas tentang BUMDes.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan – pertanyaan peneliti dan apabila menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu dan apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

2. Lokus Penelitian

Adapun tempat atau lokasi yang di jadikan penelitian adalah BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya. Penetapan lokasi penelitian didasari oleh beberapa alasan dan pertimbangan, kesesuaian substansi berdasarkan observasi awal bahwa :

1. BUMDes Karya Jaya ABadi merupakan salah satu BUMDes yang berada di Kotawaringin Barat yang telah berjalan dan menjadi Wakil dari Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti lomba BUMDes terbaik tingkat Nasional Tahun 2016.
2. BUMDes Karya Jaya Abadi, sesuai dengan observasi awal diketahui bahwa telah memiliki berbagai unit usaha yang dikelola dan sampai saat ini hanya BUMDes Karya Jaya Abadi yang telah memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa.
3. Berhubungan dengan pengelolaan BUMDes Karya Jaya ABadi dalam mengelola administrasi maupun potensi desa masih ditemukan berbagai permasalahan seperti yang dikemukakan pada latar belakang, yaitu bahwa minimnya PAD yang didapat dari bagi hasil keuntungan BUMDes dan adanya salah satu unit yang sudah tidak beroperasi lagi sehingga timbul pertanyaan peneliti bahwa faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan BUMDes yang dilakukan oleh pengurus BUMDes

Beberapa pertimbangan sebagaimana yang disampaikan oleh Lexy Moleong (2015:109) bahwa cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan cara mempertimbangkan teori substansif, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah ada kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Unit Responden dalam penelitian ini adalah yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan BUMDes maupun secara khusus membidangi pengelolaan unit usaha BUMDes Karya Jaya Abadi yang dianggap

mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di lokasi penelitian, yaitu :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Ketua BPD Desa Amin Jaya;
5. Pengelola BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya;
6. Tokoh Masyarakat yang turut memonitor dan merasakan dampak dengan adanya kebijakan BUMDes;

Pemilihan Informan ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan secara langsung dalam kebijakan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga dapat memperoleh data sesuai dengan topik perumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus mengukur seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Menurut Sugiyono (2008 : 222) bahwa “Peneliti kualitatif *sebagai human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya”.

Setelah data selesai dikumpulkan dari tempat penelitian, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipahami untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Moleong (2015;4-5) mengatakan bahwa:

“Jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan memepersiapkannya lebih dahulu sebagaimana yang lazim digunakan didalam penelitian klasik, maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Hanya manusia sebagai instrumen pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian ia pasti dapat menghindarinya serta dapat mengatasinya.”

Mengacu kepada pendapat di atas, instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Dan alat yang digunakan dalam wawancara adalah alat perekam untuk merekam hasil wawancara untuk mempermudah dalam melakukan analisis data.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikemukakan Sugiyono (2008 : 224) :

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan langsung dengan maksud untuk memperkuat data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terbuka (*open interview*). Hal ini dimaksudkan agar responden mengetahui maksud dari wawancara tersebut. Selain itu juga penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, artinya pewawancara bebas menanyakan apa saja berdasarkan pedoman wawancara (interview guide) yang merupakan penuntun bagi penulis dalam menggambarkan pertanyaan – pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga memberikan kebebasan yang seluas – luasnya bagi responden untuk menyampaikan argument.

Dalam Penelitian ini sumber yang diwawancarai antara lain : Kepala Desa Amin Jaya, Ketua BPD Desa Amin Jaya, Pengurus BUMDes, Camat Pangkalan Banteng dan Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

b) Dokumentasi

Pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi. Menurut Imam Gunawan, (2013:177) teknik dokumentasi adalah “salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis”. Sedangkan menurut Arikunto (2006:236) “Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan – catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya”. Dengan acuan dari pendapat di atas, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melihat, mencatat dan mempelajari dari sumber – sumber tertulis yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

c) Observasi.

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti. Pada observasi yaitu dengan memperhatikan fenomena-fenomena yang dicermati di lapangan, baik fenomena yang berhubungan secara langsung dengan penelitian maupun yang tidak berhubungan secara langsung. Dalam melakukan observasi, penulis berada di lokasi penelitian di BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya untuk mengamati secara teliti dan seksama keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian, seperti mengamati proses pelaksanaan unit usaha BUMDes seperti pembuatan paving blok dan proses jual beli buah sawit.

E. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari tempat penelitian, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipahami untuk menjawab persoalan – persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Menurut Patton dalam Moleong, (2015 : 103) memberikan definisi : "Analisa data adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar". Analisa kualitatif adalah suatu penyajian sebagai hasil pengelolaan data yang telah dianalisis bukan dalam bentuk angka-angka atau bilangan tetapi berbentuk kata-kata. Berkaitan dengan penelitian ini, data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Maleong (2015:248) prosesnya berjalan sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Analisis yang kemudian dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) dengan melihatnya seagai tiga rangkaian aktivitas bersamaan, yaitu: 1) Kondensasi data, 2) Display data, dan 3) Penarikan

kesimpulan/Verifikasi. Analisis data kualitatif model Miles, Huberman dan Saldana terdapat 3 (tiga) tahap :

1. Kondensasi Data

Kondensasi Data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, mengabstraksi dan atau transformasi data yang muncul sesuai dari yang tertulis di catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan material-material empiris lainnya. Dengan kondensasi, data dibuat semakin kuat (meninggalkan istilah reduksi data sebab memiliki implikasi untuk melemahkan atau kehilangan sesuatu dalam prosesnya).

Data kondensasi terjadi terus menerus sepanjang proyek yang berorientasi kualitatif. Bahkan sebelum data tersebut dikumpulkan, antisipasi data kondensasi dilakukan sesuai keputusan peneliti (seringkali tanpa sadar) sesuai kerangka konseptual, sesuai pertanyaan penelitian, dan sesuai pendekatan pengumpulan data yang dipilih. Sebagai proses pengumpulan data, episode data kondensasi selanjutnya menulis ringkasan, pengkodean, mengembangkan tema, menggenalisir kategori-kategori, dan menulis catatan analisis. Proses kondensasi/transformasi data berlanjut setelah penelitian lapangan berakhir, sampai laporan akhir diselesaikan.

Kondensasi data bukanlah merupakan sesuatu yang terpisah dari analisis. Ini adalah bagian dari analisis. Keputusan peneliti-memilih potongan data untuk dikodifikasi dan yang dikeluarkan, merangkum label kategori ringkasan terbaik sejumlah potongan data, mengembangkan kisah

untuk diceritakan-adalah seluruh pilihan analisis. Kondensasi data adalah sebuah bentuk analisis yang mempertajam, meringkas, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan "akhir" bisa ditarik dan diverifikasi.

2. Display Data

Langkah kedua dari kegiatan analisis adalah menampilkan data. Umumnya, sebuah tampilan adalah sesuatu yang diorganisasikan, mengkompresi bagian informasi yang memungkinkan menggambarkan kesimpulan dan tindakan. Melihat tampilan data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-baik menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan berdasarkan pemahaman itu.

Seperti kondensasi data, penciptaan dan penggunaan display tidak terpisah dari analisis itu adalah bagian dari analisis. Merancang tampilan memutuskan pada baris dan kolom dari matriks untuk data kualitatif dan memutuskan, di mana bentuk, harus dimasukkan dalam seluruh kegiatan analitis.

Miles and Huberman (1984) menyatakan : "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the post has been narrative text*". (yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif). Miles dan Huberman membantu para peneliti kualitatif dengan model-model penyajian data yang analog dengan model-model penyajian data kuantitatif statis, dengan menggunakan tabel, grafiks, matriks dan semacamnya, bukan diisi dengan angka-angka melainkan dengan kata atau *phase* verbal.

Dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif juga dapat berupa : bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), pictogram, dan sejenisnya. Kesimpulan yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian faktor-faktor yang mempengaruhi tentang implementasi kebijakan BUMDes yang berada di Desa Amin Jaya.

3. Menggambarkan dan Menverifikasi Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam proses analisa adalah kesimpulan dan verifikasi data. Mulai dari pengumpulan data analisa kualitatif mengartikan apa bagaimana pola pencatatan, penjelasan mengenai kondisi lapangan, kausalitas lapangan dan pembuatan proposisi. Peneliti yang memiliki kompetensi memegang kesimpulan, menjaga keterbukaan data dan tentang skeptis. Kesimpulan akhir dari suatu penelitian mungkin tidak bisa selesai sampai sempruna tergantung kondisi lapangan, metode pengumpulan data, dan batas waktu penyelesaian pengambilan data.

Selanjutnya adalah melakukan kondensasi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan atau verifikasi, proses ini berada pada waktu

penelitian sedang berjalan dan setelah pengumpulan data dimana proses ini dilakukan secara paralel. Hal ini dilakukan untuk membuat pandangan umum yang di sebut analisis. Tiga tahapan ini bisa di presentasikan dalam penyajian data. Dalam pandangan ini tiga tipe aktivitas analisis dan aktifitas pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara interaktif. Pengkodean data, contohnya (kondensasi data), mengawali ide baru untuk apa yang harus dilakukan dalam matrik (penyajian data). Memasukkan data dalam kondensasi data.

Dalam kolom lain hasil dari matrik ini untuk melakukan test terhadap kesimpulan. Dalam pandangan ini, analisa kualitatif dilakukan secara berkelanjutan, dengan interaktif isu yang ada dalam kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan yang diakhiri dengan verifikasi data akan menghasilkan episode analisa yang baik dan antara satu data dengan data yang lain saling melengkapi. Proses ini sebenarnya tidak terlalu kompleks, yaitu bagaimana konsep pembicaraan, kemudian model analisa kuantitatif bisa di lakukan. Pada akhirnya penelitian kualitatif lebih menempatkan sisi humanis. Dari sini penelitian kualitatif di perlukan untuk mendokumentasikan proses pembelajaran untuk kita. Kita perlu lebih mengerti dengan lebih jelas apa yang akan terjadi ketika kita menganalisa data , dan untuk memperbaiki metode kita sehingga dapat di gunakan secara umum oleh banyak orang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Amin Jaya

Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Desa eks transmigrasi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat ketika itu masih Kecamatan Kumai. Secara historis awal berdirinya Desa Amin Jaya dapat di urutkan sebagai berikut :

1. Tahun 1984 – 1985 dilakukan pembukaan lahan untuk pemukiman transmigrasi yang di percayakan kepada kontraktor PT. Amin Jaya Abadi.
2. Pada tahun 1986 -1987 realisasi penempatan trans pertama WPIX, SKP,D Sebukat ID ,KUMAI
3. Pada tahun 1987 realisasi penempatan berikutnya UPT sebukat IID SPIII Amin Jaya (Dusun II)
4. Tahun 1989 menjadi Desa persiapan yang dinamakan desa Kelapa II,pada tahun 1992 diganti menjadi Desa Sumber Jaya namun mengingat nama tersebut tidak begitu dikenal maka pada tahun 1996 nama Desa persiapan kembali diganti dengan nama Amin Jaya.
5. Tahun 1996 Desa Amin Jaya definitif sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 3 Oktober No.61 tahun 1996 tentang Peningkatan Status Desa Persiapan Eks UPT/Desa Transmigrasi menjadi Desa dipinitif di Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Nama Amin Jaya sendiri di ambil dari nama PT.Amin Jaya Abadi, sebuah perusahaan yang membuka lahan pemukiman transmigrasi pertama.
7. Pada tahun 2011 Desa Amin Jaya dimekarkan menjadi 2 Desa yaitu Dusun I sebagai desa Induk tetap menjadi Desa Amin Jaya dan Dusun II (SP III) menjadi Desa Sungai pakit.

Desa Amin Jaya merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Desa Amin Jaya berada di wilayah paling timur dari Kabupaten Kotawaringin Barat tepatnya berada di perbatasan dengan Kabupaten Seruyan. Ditinjau dari segi geografis Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng terletak 32 meter dari permukaan laut. Desa Amin Jaya terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu dusun Sapta Jaya dan Dusun Amin Jaya. Jarak Desa Amin Jaya dengan ibukota Kecamatan Pangkalan Banteng berjarak 10 Kilometer sedangkan ke ibukota kabupaten berjarak 75 Kilometer. Adapun batas dari Desa Amin Jaya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Sungai Pakit
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan
- c. Sebelah Selatan : Desa Natai Kerbau
- d. Sebelah Barat : Desa Karang Mulya

Luas wilayah desa Amin Jaya 160.587 Ha. Desa Amin Jaya juga diapit oleh 3 Perusahaan Besar Swasta yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yaitu PT. Indotruba Hutani, PT. BJAP dan PT. WSSL. Dengan demikian Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki potensi pengembangan ekonomi rakyat di sektor perkebunan.

Dalam pelaksanaan program pembangunan, penduduk merupakan salah satu faktor pendukung yang menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan. Penduduk merupakan salah satu modal dalam pembangunan yang mutlak harus ada. Penduduk dapat dikatakan sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai obyek pembangunan.

Pendudukan dikatakan sebagai subyek pembangunan karena penduduk sebagai tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan, karena tenaga kerja sebagai potensi sosial maka haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga sangat diharapkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan sebagai obyek pembangunan karena sasaran dari program pembangunan adalah menuju kepada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu keadaan dan perkembangan penduduk dalam suatu wilayah perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2015 penduduk di Desa Amin Jaya berjumlah 5812 jiwa yang terdiri dari 3.135 jiwa laki-laki dan 2.677 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.972 yang terbagi di wilayah pemukiman desa dan pemukiman perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai rincian jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1
JUMLAH PENDUDUK DESA AMIN JAYA
BERDASARKAN PERSEBARAN TIAP RT

| NO | RT | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | JIWA | KK |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 01 | 80 | 71 | 151 | 47 |
| 2 | 02 | 83 | 83 | 166 | 48 |
| 3 | 03 | 80 | 69 | 149 | 50 |
| 4 | 04 | 95 | 94 | 189 | 54 |
| 5 | 05 | 87 | 77 | 164 | 50 |
| 6 | 06 | 190 | 190 | 380 | 112 |
| 7 | 07 | 74 | 81 | 155 | 46 |
| 8 | 08 | 59 | 55 | 114 | 33 |
| 9 | 09 | 57 | 45 | 102 | 33 |
| 10 | 10 | 103 | 104 | 207 | 61 |
| 11 | 11 | 37 | 35 | 72 | 21 |
| 12 | 12 | 51 | 42 | 93 | 29 |
| 13 | 13 | 51 | 44 | 95 | 27 |
| 14 | 14 | 45 | 37 | 82 | 26 |
| 15 | 15 | 44 | 34 | 78 | 21 |
| 16 | 16 | 96 | 88 | 184 | 53 |
| 17 | 17 | 303 | 257 | 560 | 147 |
| 18 | 18 | 120 | 107 | 227 | 60 |
| 19 | 19 | 249 | 172 | 421 | 170 |
| 20 | 20 | 459 | 217 | 676 | 222 |
| 21 | 21 | 528 | 429 | 957 | 360 |
| 22 | 22 | 391 | 297 | 688 | 288 |
| 23 | 23 | 46 | 41 | 87 | 25 |
| Jumlah | | 3328 | 2669 | 5997 | 1963 |

Sumber : RPJMDes Desa Amin Jaya Tahun 2016-2022

Tabel di atas menunjukkan RT.21 Desa Amin Jaya memiliki penduduk terbesar sebanyak 957 jiwa yang merupakan wilayah pemukiman perusahaan, sedangkan RT.11 memiliki jumlah penduduk terkecil sebanyak 72 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin menggambarkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Amin Jaya secara garis besar adalah sebagai, berikut :

TABEL 4.2
PRASARANA DESA

| No. | Bangunan | Jumlah | Keterangan |
|-----|--------------------|---------|------------|
| 1. | Kantor Desa | 1 Unit | 1 |
| 2. | Aula Desa | 1 Unit | |
| 3. | Balai Desa | 1 Unit | |
| 4. | Pustu | 1 Unit | |
| 5. | Polindes | 1 Unit | |
| 6. | Posyandu | 1 Unit | |
| 7. | Masjid | 1 Unit | |
| 8. | Mushola | 15 Unit | |
| 9. | Gereja | 1 Unit | |
| 10. | Gedung PAUD | 1 Unitt | |
| 11. | Gedung Sekolah TK | 2 Unit | |
| 12. | Gedung Sekolah SD | 1 Unit | |
| 13. | Gedung Sekolah SMK | 1 Unit | |
| 14. | Jalan Desa | 22 km. | |

| | | | |
|-----|---------------------|---------|--|
| 15. | Jembatan | 7 Unit | |
| 16. | Poskamling | 21 Unit | |
| 17. | Pos Cek Poin Ternak | 1 Unit | |

Sumber : Kantor Desa Amin Jaya

Dari tabel di atas dapat menunjukkan bahwa prasarana yang berada di Desa Amin Jaya telah cukup baik dimana fasilitas pendidikan adanya dari Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga SMK berada di wilayah Desa Amin Jaya. Desa Amin Jaya juga memiliki fasilitas kesehatan dimana adanya pusku, Polindes dan Posyandu. Kemudian sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang dalam bermasyarakat juga telah ada di desa Amin Jaya.

2. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Landasan Hukum

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem

usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007) dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa :

“Bumdes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial institution) dan komersial (commercial institution). Bumdes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes yang merupakan suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari Pemerintah Desa dan masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pendirian BUMDes Karya Jaya Abadi memiliki sejarah yuridis yang panjang. Awal berdirinya BUMDes Karya Jaya Abadi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah pada pasal 213 ayat 1, yaitu :”Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Selanjutnya pasal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjelaskan mekanisme pembentukan BUMDes dan meminta kepada setiap pemerintah daerah untuk secepatnya menerbitkan peraturan daerah tentang tata cara pendirian BUMDes sesuai dengan karakteristik daerahnya dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut.

Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 07 tentang Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2008 yang mengatur tata cara pendirian

BUMDes. Selain Permendagri No 39 Tahun 2010, perda ini juga menjadi acuan Pemerintah Desa Amin Jaya untuk mendirikan BUMDes sekaligus menyusun Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART). Akhirnya Pemerintah Desa Amin Jaya menerbitkan Peraturan Desa Amin Jaya No. 02 Tahun 2014 tentang Pendirian BUMDes sekaligus menjadi landasan hukum BUMDes Karya Jaya Abadi. Sampai saat ini BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki 3 (tiga) unit usah, yaitu pembuatan paving block, jual beli kelapa sawit dan menjahit (taylor).

b. Tujuan Pendirian

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan perekonomian Desa;
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f) Membuka lapangan kerja;
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (2007) dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa terdapat 6 prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yaitu :

- a) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang

dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

c. Permodalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 04 Tahun 2015 BUMDes dapat memperoleh Permodalan melalui sebagai berikut :

- a) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDes
- b) Modal BUMDes terdiri atas :
 - Penyertaan modal desa, terdiri atas :
 - a) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan

sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

d) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

- Penyertaan modal masyarakat desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

BUMDes Karya Jaya Abadi memiliki permodalan dari penyertaan modal pemerintah desa yang dianggarkan melalui APBDes Desa Amin Jaya. Dengan adanya permodalan yang dilakukan pemerintah desa kepada BUMDesnya diharapkan dapat dikelola semaksimal mungkin dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya dengan berbagai program BUMDes yang ada, seperti mengkomodir keluhan masyarakat terkait penjualan hasil perkebunan, menambah lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian di desa.

d. Pembagian Laba Usaha BUMDes

BUMDes yang merupakan suatu badan usaha milik desa maka BUMDes sesuai dengan tujuannya didirikan adalah untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian desa. Dalam pembagian laba BUMDes dituangkan kedalam AD/ART BUMDes. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional dan mandiri sehingga selain untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya juga mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian desa.

Adapun persentase pembagian laba hasil usaha BUMDes Karya Jaya Abadi yang dituangkan dalam AD/ART sebagai berikut :

- a) Penambahan Modal Usaha : 40%
- b) PAD : 30%
- c) Insentif Pengurus dan Pengawas : 20%
- d) Pendidikan dan Pelatihan : 5%
- e) Kegiatan Sosial : 2,5 %
- f) Dana Cadangan : 2,5%

B. Hasil Penelitian

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat. BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan, memotivasi serta memfasilitasi desa di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membentuk dan mendirikan BUMDes serta melakukan pendampingan terhadap pengelolaan unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. Pembentukan BUMDes di Kotawaringin Barat yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang ingin mewujudkan kemandirian desa dalam mengoptimalkan berbagai potensi yang berada di desa. Adapun dasar hukum yang di gunakan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini adalah Permendes No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya untuk mendampingi desa untuk membentuk dan mendirikan BUMDes di setiap desa seperti mendampingi musyawarah desa, pembentukan BUMDes, pemilihan

pengurus, penyusunan AD/ART, penyusunan standar operasional prosedur dan sampai pada penentuan unit usaha yang akan dijalankan. Hal ini sesuai seperti yang diungkapkan oleh Bapak Romhendi, S.IP (Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat) pada wawancara pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melihat BUMDes sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat desa tentu tiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kami pemerintah mengeluarkan berbagai prasyarat indikator dalam hal pengajuan potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha yang akan dikelola Badan Usaha Milik Desa.”

Pembentukan dan pendirian BUMDes terus digalakkan oleh Pemerintah Daerah dengan telah menetapkan Peraturan Daerah No. 07 tentang Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2008 yang mengatur tata cara pendirian BUMDes. Pemerintah Daerah melalui BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan terus memotivasi dan mendorong setiap Pemerintahan Desa untuk menginisiasi terbentuknya BUMDes di desanya. Salah satu hal yang menjadi faktor kuat pemerintah daerah terus menggalakkan pembentukan BUMDes ini adalah dikarenakan saat ini desa telah menerima kucuran dana baik itu Dana Desa yang bersumber dari APBN dan ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar. Dengan besarnya jumlah dana transfer ke desa maka akan semakin memudahkan pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal kepada BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki oleh desa. Berikut daftar DD dan ADD yang diterima setiap desa di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2016 :

TABEL 4.3
JUMLAH ALOKASI DANA TRANSFER BAGI DESA
DI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

| No | Desa | Alokasi Dana Transfer | | | | Jumlah |
|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Dana Desa | Alokasi Dana Desa | Bagi Hasil Pajak Daerah | Bagi Hasil Retribusi Daerah | |
| 1 | Pangkalan Banteng | 620.910.000 | 1.284.246.700 | 34.448.900 | 12.558.200 | 1.952.193.800 |
| 2 | Karang Mulya | 673.018.000 | 947.327.900 | 69.967.700 | 25.567.500 | 1.715.881.100 |
| 3 | Kebun Agung | 631.920.000 | 899.927.000 | 54.716.900 | 19.994.600 | 1.605.928.500 |
| 4 | Sidomulyo | 625.977.000 | 899.941.100 | 44.955.700 | 16.427.600 | 1.587.301.400 |
| 5 | Marga Mulya | 609.476.000 | 830.393.200 | 46.627.300 | 17.038.400 | 1.503.534.900 |
| 6 | Amin Jaya | 704.259.000 | 1.074.165.000 | 36.055.900 | 13.175.400 | 1.827.655.300 |
| 7 | Arga Mulya | 638.573.000 | 1.006.177.800 | 45.488.900 | 16.622.500 | 1.706.862.200 |
| 8 | Mulya Jadi | 630.744.000 | 799.816.300 | 38.891.400 | 14.211.600 | 1.483.663.300 |
| 9 | Natai Kerbau | 636.047.000 | 785.037.900 | 37.133.200 | 13.569.100 | 1.471.787.200 |
| 10 | Simpang Berambai | 628.008.000 | 835.080.400 | 37.371.100 | 13.656.100 | 1.514.115.600 |
| 11 | Sungai Hijau | 656.489.000 | 820.986.700 | 38.852.400 | 14.197.400 | 1.530.525.500 |
| 12 | Sungai Bengkuang | 641.639.000 | 964.787.800 | 35.677.600 | 13.037.200 | 1.655.141.600 |
| 13 | Sungai Kuning | 659.773.000 | 739.684.100 | 28.408.100 | 10.380.800 | 1.438.246.000 |
| 14 | Sungai Pakit | 664.021.000 | 934.348.400 | 35.239.200 | 12.877.000 | 1.646.485.600 |
| 15 | Sungai Pulau | 615.534.000 | 764.608.200 | 28.408.100 | 10.380.800 | 1.418.931.100 |
| 16 | Karang Sari | 618.058.000 | 722.640.800 | 28.408.100 | 10.380.800 | 1.379.487.700 |
| 17 | Berambai Makmur | 617.598.000 | 727.447.800 | 28.408.100 | 10.380.800 | 1.383.834.700 |

Sumber : Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng

Dari data tabel di atas dapat menunjukkan bahwa Desa Amin Jaya memperoleh Dana Desa (DD) tertinggi dibanding dari desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu sebesar Rp. 704.259.000 sedangkan Desa Sungai Pulau merupakan Desa yang memperoleh Dana Desa terendah yaitu sebesar Rp. 615.534.000. Sedangkan perolehan Alokasi Dana Desa (ADD) tertinggi yaitu Desa Pangkalan Banteng sebesar Rp. 1.284.246.700 dan desa yang memperoleh ADD terendah adalah desa Karang Sari yaitu sebesar Rp. 722.640.800. Secara akumulatif Desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng yang memperoleh dana transfer adalah desa Pangkalan Banteng dengan dana transfer sebesar Rp. 1.952.193.800 dan Desa Karang Sari memperoleh dana transfer terendah diantara desa-desa yang berada di wilayah kecamatan Pangkalan Banteng yaitu sebesar Rp. 1.379.487.700.

Dengan kucuran dana yang cukup besar baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah maka diharapkan Pemerintah Desa dapat menggunakan dana tersebut seoptimal mungkin untuk melakukan pembangunan desa dan juga yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat. BUMDes yang merupakan salah satu lembaga desa untuk mengelola berbagai aset dan potensi yang dimiliki oleh desa, diharapkan dapat membantu pergerakan dari pemerintah desa untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat desa sehingga terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desanya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Perda No. 07 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa dan melalui BPMD terus mendorong masing-masing desa untuk segera membentuk BUMDes. Walaupun dengan keterbatasan dana dan personil yang ada di BPMD khususnya di bidng Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM BPMD Kab. Kotawaringin Barat) tidak menyurutkan semangat pemerintah daerah untuk terus menggalakkan program kebijakan BUMDes. Pada saat ini sebanyak 51 desa, dari 81 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, telah mendirikan BUMDes. Akan tetapi hanya 16 BUMDes tersebut yang telah memiliki pengurus atau kepengurusan serta BUMDes yang telah terbentuk masih banyak yang belum menyusun AD/ART sehingga aktivitas atau implementasi dari pendirian BUMDes masih belum berjalan.

Desa Amin Jaya merupakan salah satu desa yang telah membentuk BUMDes yang juga merupakan BUMDes pertama yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. BUMDes yang berada di Desa Amin Jaya juga dijadikan rujukan dan percontohan bagi pemerintah desa dan BUMDes yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat karena kegiatan usaha dari BUMDes Karya Jaya Abadi bervariasi dan inovatif yang salah satunya adalah produksi paving block yang merupakan satu-satunya usaha yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari 81 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 51 desa telah mendirikan BUMDes dan hanya 16 BUMDes yang telah memiliki pengurus atau kepengurusan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Romhendi, S.IP (Kabid Usaha Ekonomi

Masyarakat) pada wawancara pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2016

Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Pada Tahun 2014 BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya merupakan salah satu BUMDes di Kotawaringin Barat yang dijadikan BUMDes percontohan dan sampai saat ini dari sekian BUMDes percontohan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat BUMDes Karya Jaya Abadi perkembangan jenis usaha yang berkembang dengan cukup baik, sedangkan BUMDes percontohan lain seperti BUMDes Pangkalan Satu di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai, BUMDes Karya Makmur di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada, BUMDes Mua Sejahtera di Kecamatan Arut Utara masih belihat terlihat aktifitas usaha yang dijalankan. Namun sampai saat ini dari 81 Desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 51 Desa yang telah membentuk BUMDes dan target di tahun 2017 terbentuknya BUMDes di seluruh desa Kotawaringin Barat. Dan sampai saat ini hanya 16 BUMDes yang telah membentuk kepengurusan atau pengurus BUMDes”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Aliransyah (Camat Pangkalan Banteng) dalam wawancara pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2016 Pukul 09.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“BUMDes Desa Amin Jaya adalah satu-satunya BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng yang terus berkembang. BUMDes ini juga merupakan BUMDes yang pertama berdiri di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng. Sedangkan BUMDes yang berada di desa lain masih baru pembentukan dan belum ada unit usaha yang dijalankan BUMDes”.

BUMDes diharapkan sebagai wujud dari strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam roda pembangunan berskala desa yang mampu mengembangkan aktivitas serta kreatifitas kegiatan ekonomi masyarakat desa. BUMDes juga digadag-gadang dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal dan permintaan pasar.

Untuk mendorong berkembangnya program usaha yang dijalankan masing-masing BUMDes, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya

dalam memfasilitasi dengan menyiapkan regulasi dalam rangka pengoptimalan pengelolaan BUMDes serta penguatan unit-unit usaha BUMDes. Masing-masing desa yang telah membentuk BUMDes dapat menganggarkan maksimal 20% dari total APBDDes nya, sedangkan untuk selanjutnya desa dapat mengalokasikan penyertaan modal BUMDes sebesar 10 % dari total APBDDes. Hal ini dipertegas melalui wawancara dengan oleh Bapak Romhendi, S.IP (Kabid Usaha Ekonomi Masyarakat) pada wawancara pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2016 Pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Masing-masing desa dapat menganggarkan penyertaan modal awal BUMDes sebesar 20% dari APBDDes dan 10% untuk tahun-tahun berikutnya. Kebijakan ini dapat dijadikan rangsangan bagi para pengurus BUMDes untuk dapat mengoptimalkan kegiatan usahanya”

2. Badan Usaha Milik Desa “BUMDes” Karya Jaya Abadi

a. Latar Belakang Pembentukan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya

Pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di. Namun, kebijakan-kebijakan yang ada dinilai belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan dengan membentuk lembaga ekonomi di tingkat pedesaan. Lembaga ekonomi di tingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar masyarakat di pedesaan memiliki

usaha mikro dan kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan potensi desa setempat guna mendukung dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Maka pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan peluang bagi Pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian desanya dengan membentuk sebuah badan usaha yang dimiliki oleh desa dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan sebuah instrument pemberdayaan ekonomi lokal skala pedesaan dalam mengelola dan mengoptimalkan segala potensi yang ada di desa. Pembentukan BUMDes dimaksudkan sebagai pilar untuk menumbuhkembangkan perekonomian yang ada di desa sebagai perwujudan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan skala pedesaan.

Dalam mengelola usahanya BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga dapat memberikan kontribusi bagi PAD Desa yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan di desa dengan optimal. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan UU No. 06 Tahun 2014 tentang desa yaitu menjadikan desa menjadi lebih mandiri, tidak hanya

sekedar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa saja tetapi juga dalam pengelolaan keuangan dan potensi desa.

Pengembangan BUMDes tidak hanya berdasarkan aspek target pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi yang lebih penting adalah menjadikan aktifitas perekonomian yang kondusif dalam mencapai kesejahteraan sosial di tingkat desa dan paling penting untuk memecahkan berbagai kendala pengembangan usaha masyarakat. BUMDes juga diharapkan dapat lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menggali secara optimal potensi desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sejarah pembentukan BUMDes di Desa Amin Jaya ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang selalu mengeluhkan kondisi jalan ke areal perkebunan masyarakat yang rusak parah, karena pada saat itu dana desa sangat minim dan belum adanya kegiatan pembangunan dari pemerintah daerah sehingga pada awal tahun 2014 Pemerintah Desa Amin Jaya berinisiatif mengakomodir permasalahan tersebut dengan mendirikan sebuah badan usaha untuk mengelola jalan kebun desa agar jalan tersebut dapat selalu di pelihara dengan baik. Namun pada saat itu Musyawarah Desa yang dihadiri Pemerintah Desa beserta BPD dan Tokoh masyarakat hanya merumuskan dan menyepakati tentang pendirian BUMDes Desa Amin Jaya dan pengelolanya saja, sedangkan peraturan desa tentang pendirian BUMDes, nama BUMDes serta AD/ART nya belum disusun. Sehingga para pengurus BUMDes hanya

menjalankan unit pengelolaan jalan kebun desa tanpa adanya peraturan desa yang mengikat. Kemudian di awal tahun 2014 tepatnya di bulan Maret Tahun 2014 yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini BPMD memfasilitasi proses pembentukan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya sekaligus melakukan pendampingan dalam penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Alman Riansyah (Kepala Desa Amin Jaya) dalam wawancara pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Kebijakan pendirian BUMDes Karya Jaya Abadi awalnya hanya sebatas hasil dari musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat masih belum tertuang di Peraturan Desa Amin Jaya dan pada saat itu musyawarah dilaksanakan hanya semata-mata untuk mengakomodir keluhan dari para petani kebun sawit yang jalan mereka lintasi rusak parah karena pemahaman kami pada saat itu tentang BUMDes masih awam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2014 kami melakukan musyawarah desa kembali sebagai syarat pendirian BUMDes dengan difasilitasi oleh Bapak Romhendi dari BPMD untuk menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes Karya Jaya Abadi beserta AD/ART nya. Awalnya pengelolaan jalan kebun tersebut sangat menguntungkan. Namun saat ini unit pengelolaan jalan kebun desa sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan pada pertengahan tahun 2015 adanya klaim lahan yang dilakukan masyarakat lokal yang merasa jalan tersebut adalah miliknya sebagai pengelola jalan tersebut. Untuk menghindari konflik maka kami putuskan agar pengelolaan jalan tersebut tidak dikelola oleh BUMDes lagi.”

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya di atas, pengelolaan jalan kebun desa merupakan unit usaha pertama sejak didirikannya BUMDes. Namun saat ini unit tersebut sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan adanya klaim dari salah satu masyarakat yang merasa jalan yang dikelola tersebut adalah miliknya. Sehingga untuk menghindari konflik yang berkepanjangan maka unit pengelolaan jalan tersebut sudah tidak dikelola oleh BUMDes lagi.

Salah satu tujuan adanya kebijakan BUMDes, adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang didapat berdasarkan persentase keuntungan berdasarkan peroleh laba hasil usaha yang dikelola oleh BUMDes. Dengan adanya peningkatan PAD desa yang disetorkan oleh BUMDes kepada pemerintah desa, maka pembangunan di desa pun akan semakin cepat. Berikut disajikan kontribusi BUMDes terhadap PAD Desa :

Tabel 4.4
Kontribusi BUMDes terhadap PAD Desa Amin Jaya

| No. | Tahun | Laba Hasil Usaha (Rp) | Jumlah PAD 40% (Rp) |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2014 | 8.000.000 | 0 |
| 2 | 2015 | 12.000.000 | 8.000.000 |

Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki keuntungan bersih di tahun 2014 sebesar 8 juta rupiah dan di tahun 2015 sebesar 12 Juta rupiah dan telah menyumbangkan hasil keuntungannya berdasarkan AD/ART BUMDes sebesar 40% adalah 8 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang di dapat bahwa di tahun 2014 karena BUMDes yang pada saat itu hanya ada 1 unit yaitu pengelolaan jalan kebun desa masih memerlukan permodalan dan keuntungannya masih kecil sehingga pembagian laba hasil usaha dari BUMDes dilaksanakan di tahun 2015. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hilman selaku Direktur BUMDes Karya Jaya Abadi pada wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, beliau mengatakan bahwa :

“Pembagian Sisa laba hasil usaha BUMDes pada tahun 2014 berdasarkan musyawarah dengan kepala beserta tokoh masyarakat karena laba BUMDes yang masih sedikit yaitu hanya 8 juta rupiah maka disepakati pembagiannya di pending dan dihitung pada di tahun 2015. Dan di tahun 2015 laba hasil usaha BUMDes adalah 12 juta dan ditambah dengan tahun sebelumnya menjadi 20 juta rupiah. Pembagiannya berdasarkan persentase AD/ART BUMDes.”

b. Struktur Organisasi

Setiap organisasi ataupun perusahaan mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan adalah dengan merumuskan struktur organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk membantu suatu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Proses perencanaan struktur organisasi ini membuat gambaran, pengaturan dan pengklasifikasian tugas, tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing seksi atau lini. Disamping itu di dalam struktur organisasi harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi atau fungsi dari seluruh aktivitas organisasi agar antara satu dengan lainnya saling berkaitan. Dengan demikian struktur organisasi sehingga dapat memungkinkan merumuskan strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan Permendes No. 04 Tahun 2015 pada pasal 14 ayat 1 bahwa persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes adalah sebagai berikut :

- 1) Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
- 2) Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 3) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan

- 4) Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat

Pasal 16 :

“Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”.

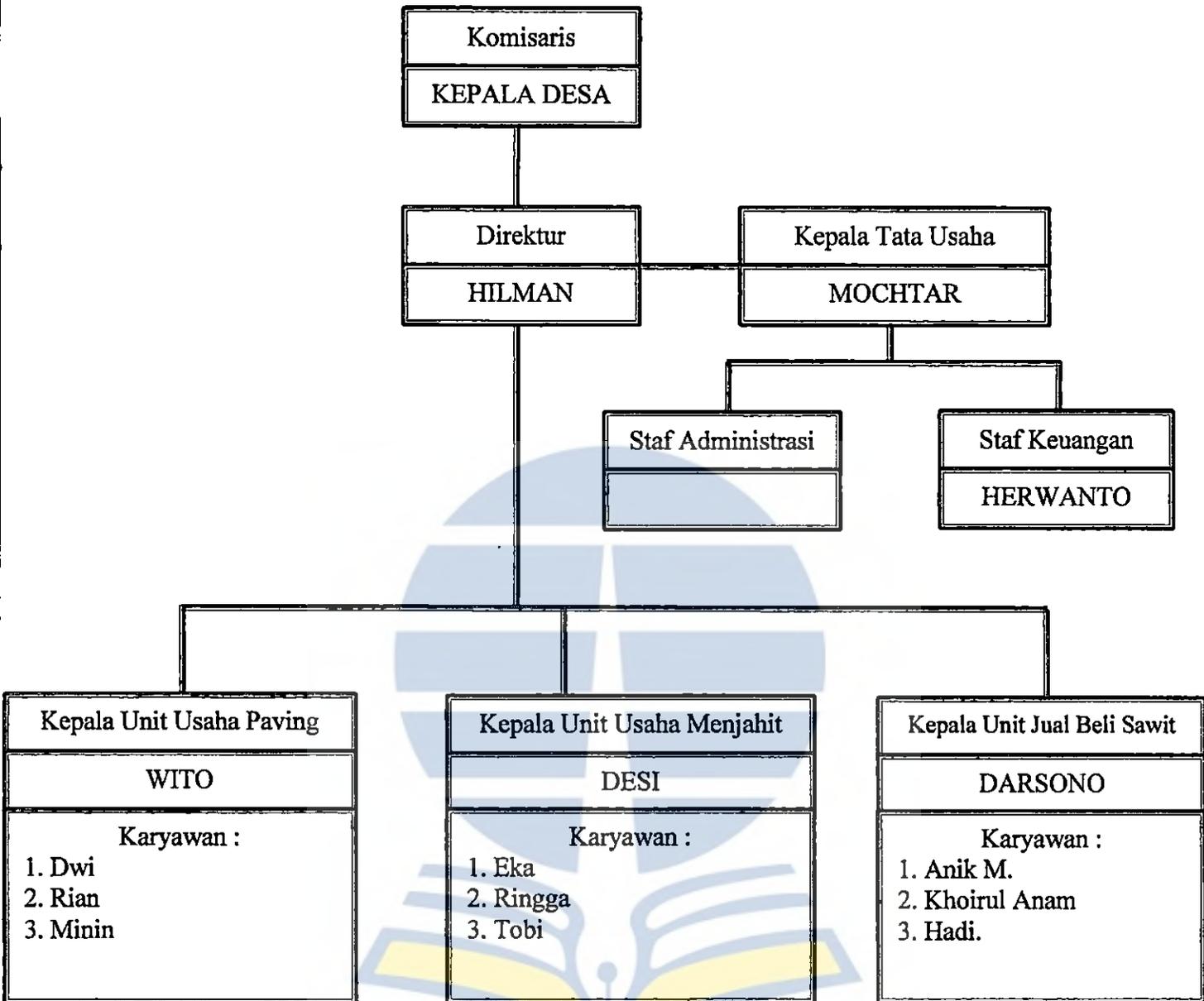
Berdasarkan Permendes No 04 Tahun 2015 di atas bahwa pengurus BUMDes dibentuk melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh berbagai kalangan. Walaupun pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi telah terbentuk sebelum terbitnya Permendes ini, namun proses pemilihan pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi pada tahun 2014 silam juga melalui proses musyawarah desa, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alman Riansyah (Kepala Desa Amin Jaya) pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pada saat itu pembentukan pengurus BUMDes kita laksanakan dengan musyawarah desa yang juga bertepatan dengan musyawarah desa untuk membentuk BUMDes Amin Jaya yang juga dihadiri oleh Bapak Romhendi dari BPMD sebagai pendamping. Sebelumnya kami telah menyiapkan daftar nama calon pengurus untuk dipilih dalam forum. Calon pengurus yang kami ajukan merupakan warga Desa Amin Jaya yang juga merupakan para pengusaha sukses dan kami nilai memiliki semangat untuk membantu pemerintah desa dalam membangun desa karena mereka yang kami calonkan juga aktif dalam berbagai organisasi yang ada di desa. Setelah disepakati di musdes maka para calon pengurus terpilih kami tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Amin Jaya”

Adapun tugas dari pengurus BUMDes yang tertuang pada Peraturan Desa Amin Jaya No 2 Tahun 2014 pada pasal 8 yang berbunyi:

- a) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.





Gambar 4.1

Struktur Organisasi BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya

(Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi)

Berdasarkan gambar struktur organisasi BUMDes Karya Jaya Abadi menunjukkan bahwa ada 6 orang pengurus BUMDes dan 9 orang karyawan. Untuk pengangkatan 6 orang pengurus BUMDes diangkat melalui surat Keputusan Kepala Desa Amin Jaya, sedangkan 9 orang karyawan BUMDes diangkat oleh kepala unitnya masing-masing.

Tabel 4.5
Keadaan Pengurus BUMDes Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|-----|---------------------|----------------|
| 1. | Pasca Sarjana / S 2 | - |
| 2. | Sarjana / S 1 | - |
| 3. | Diploma IV / D IV | - |
| 4. | Diploma III / D III | - |
| 5. | SMA sederajat | 3 orang |
| 6. | SMP Sederajat | 3 orang |
| | TOTAL | 6 Orang |

Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi

Dari data hasil dokumentasi di Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi ini dapat disampaikan secara umum terdapat 1 orang direktur dan 5 orang pelaksana operasional BUMDes. BUMDes Karya Jaya Abadi juga memiliki karyawan kontrak dari tiap-tiap unit usahanya. Dilihat dari segi pendidikannya hanya ada 3 orang yang berijazah SMA sederajat dan 3 orang lainnya berijazah SMP sederajat. Dengan rendahnya kualitas

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BUMDes maka akan berdampak terhadap kualitas terhadap pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari para pengurus BUMDes tidak ada yang berlatar belakang pendidikan sampai ke Sarjana. Hal ini akan berdampak kepada pengelolaan administrasi yang kurang baik sehingga dibutuhkan adanya pendampingan secara intensif oleh para pendamping BUMDes yang berada di level Pemerintah Daerah untuk membina dan membimbing para pengurus dalam hal pengelolaan administrasinya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Alman Riensyah (Kepala Desa Amin Jaya) pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Para pengurus BUMDes sering mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam tata kelola administrasi BUMDes, kami juga selalu mengikutsertakan mereka untuk mengikuti program pelatihan dalam rangka menyusun perencanaan dan administrasi baik yang dilakukan oleh BPMD Kabupaten maupun Provinsi”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para pengurus BUMDes terus meningkatkan kemampuan baik dibidang pengelolaan administrasi maupun dibidang perencanaan dan pengelolaan unit usaha yang ada dengan mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh stakeholder terkait yaitu BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya program dan pelatihan tersebut maka para pengurus BUMDes ini telah belajar dan mengetahui sedikit demi sedikit tentang pembukuan

maupun laporan yang harus mereka buat untuk dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan informasi yang di dapat oleh peneliti, pengurus BUMDes telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan studi banding yang dilaksanakan baik pemerintah Kabupaten maupun povinsi, antara lain :

- a) Studi Banding yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Yogyakarta yaitu Desa Beleberan dan Desa Ponggok.
 - b) Bimbingan Teknis pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 - c) Pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
- c. Unit Usaha BUMDes Karya Jaya ABadi
- 1) Unit Usaha Menjahit

Unit usaha menjahit ini merupakan salah satu unit usaha BUMDes yang dibentuk untuk mengakomodir berbagai keluhan dari para pelaku usaha menjahit yang berada di Desa Amin Jaya yang kesulitan mencari tenaga kerja dan banyaknya pesanan dari para pelanggan baik perorangan maupun perusahaan. Dalam usaha menjahit ini bukan sebuah unit usaha untuk menyaingi para pelaku usaha sejenis yang ada melainkan untuk membantu para pelaku usaha yang ada agar dapat lebih berkembang. Unit usaha ini merupakan mitra usaha dari para pelaku usaha menjahit.

Dalam mencari tenaga penjahit ini, diawali dengan program pelatihan menjahit yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Amin Jaya pada akhir tahun 2015 lalu. Pada saat itu para peserta ada 5 orang yang kemudian salah satu diantaranya diangkat menjadi kepala unit usaha menjahit dan 4 orang lainnya diangkat sebagai karyawan. Sampai saat ini berdasarkan informasi yang didapat jumlah personil di unit usaha ini tinggal 4 orang termasuk kepala unitnya.

Unit usaha ini dibentuk pada awal tahun 2016 tepatnya di Bulan Januari 2016. Walaupun unit usaha ini dikatakan baru, namun sudah dapat dikatakan berkembang dengan baik dari modal awal yang digelontorkan oleh pihak BUMDes sebesar 30 juta rupiah sebagai modal awal untuk usaha menjahit ini, keuntungan bersih yang disetorkan ke BUMDes sudah sebesar 6 juta rupiah dari menjahit ini sampai bulan September 2016. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Hilman selaku Direktur BUMDes Karya Jaya Abadi pada wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, beliau mengatakan bahwa :

“Perkembangan dari setiap unit sudah lumayan berkembang. Sesuai dengan laporan sampai bulan September 2016 ke Pemerintah Desa keuntungan dari ketiga unit usaha ini lumayan besar dibandingkan tahun lalu. Keuntungan yang telah di diterima BUMDes dari para Kepala Unit sudah tercatat 34 juta, yang terdiri dari 6 juta dari unit menjahit, 16 juta dari unit jual beli kelapa sawit dan 12 juta dari unit paving block”.

2) Unit Usaha Jual Beli Buah Sawit

Unit usaha ini dibentuk pada awalnya dikarenakan pada masyarakat juga para pengepul buah sawit yang agak sulit memasarkan hasil kebunnya ke perusahaan. Untuk wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan sawit ada 3 PBS. Dan hanya ada 2 PBS yang menerima buah sawit dari masyarakat yaitu PT. GSPP dan PT. WSSL. BUMDes Karya Jaya Abadi telah menjalin kerja sama dengan dua perusahaan tersebut dalam hal pengiriman buah sawit yang sering disebut SPK Sawit. SPK sawit merupakan sebuah surat jalan bagi para pengepul atau pemilik buah sawit untuk menjual buah sawitnya ke perusahaan.

Sebelum adanya unit usaha ini, para pelaku usaha di jual beli buah sawit selalu menjual buahnya melalui tengkulak yang berada di kabupaten sebelah dengan potongan kurang lebih 100 rupiah per kilonya untuk pengiriman ke PT. WSSL dan 25 rupiah ke PT. GSPP. Perbedaan potongan dari kedua perusahaan tersebut disebabkan berbedanya jangka waktu pembayarannya. Sedangkan untuk unit jual beli buah sawit yang dikelola oleh BUMDes, unit ini hanya mengambil keuntungan 80 rupiah untuk pengiriman ke PT. WSSL dan 20 rupiah untuk pengiriman ke PT. GSPP. Dengan adanya dua alternatif lokasi perusahaan pembeli dan tingginya harga beli buah sawit kepada masyarakat yang memiliki buah maka pendapatan mereka pun juga akan meningkat.

Tabel 4.6
Daftar Harga Buah Sawit Per 11 Oktober 2016

| No | Nama Perusahaan | Harga Pabrik (Rp) | Harga Beli (Rp) | Keuntungan (Rp) | Jangka Waktu Pembayaran |
|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1 | PT. WSSL | 1.575 | 1.495 | 80 | 1 Bulan |
| 2 | PT. GSPP | 1.375 | 1.355 | 20 | 1 Minggu |

Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan terdapat perbedaan harga yang terus berubah setiap minggunya. Dan untuk saat ini harga beli buah sawit di PT. WSSL lebih tinggi dari PT. GSPP dengan selisih 140 rupiah sehingga banyak para pemilik buah yang menjual buahnya ke PT. WSSL. Dengan adanya dua alternatif lokasi penjualan buah ini sangat memudahkan para pemilik buah untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Setelah mengantar buah mereka ke perusahaan selanjutnya para pemilik buah dengan membawa bukti berupa kwitansi dari perusahaan mendatangi pengurus BUMDes untuk segera mencairkan dananya tanpa perlu menunggu waktu yang lama.

Pihak BUMDes Karya Jaya Abadi melalui unit jual beli buah sawit membeli buah sawit dengan harga yang lebih tinggi dibanding tengkulak besar lainnya yang ada. Dengan harga yang lebih tinggi maka pendapatan para pengepul dan pemilik kebun pendapatannya juga lebih besar sehingga prinsip-prinsip peningkatan perekonomian masyarakat desa dapat tercapai.

Permodalan dari unit usaha ini terdiri dari dua sumber, yaitu dari penyertaan modal pemerintah desa dan investasi dari masyarakat desa. Namun untuk saat ini perputaran dana yang dikelola unit ini hanya berasal dari pemerintah desa sebesar 170 juta rupiah. Dan berdasarkan data yang diperoleh unit usaha ini telah menghasilkan keuntungan bersih sebesar 16 juta rupiah. Dilihat dari sisi keuntungan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan unit usaha ini dikatakan sangat baik mengingat unit ini baru berjalan dari bulan Pebruari 2016.

Unit usaha jual beli buah sawit yang dikelola oleh BUMDes ini hanya mengandalkan permodalan dari Pemerintah Desa Amin Jaya sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki buah sawit tidak terlayani dikarenakan dana yang dikelola masih minim. Untuk mengkomodir para pemilik buah sawit ini dibutuhkan dana yang sangat besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilman selaku Direktur BUMDes Karya Jaya Abadi pada wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, beliau mengatakan bahwa:

”Untuk pengelolaan unit usaha Jual Beli Buah Sawit kami masih mengandalkan permodalan dari Pemerintah Desa sebesar 170 juta. Sesuai dengan data bahwa pendapatan dari unit ini sebesar 16 juta rupiah. Dari jumlah modal yang kami kelola ini masih sangat minim dapat banyak para pemilik buah sawit yang tidak terlayani oleh kami. Sedangkan dana investasi masyarakat sampai saat ini masih belum kami laksanakan dikarenakan untuk investasi masyarakat ini akan kami buka di tahun depan karena saat ini kami masih fokus menyiapkan aplikasi untuk investasi/tabungan masyarakat sehingga dapat lebih mudah dikontrol dan diawasi”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sarji selaku tokoh masyarakat serta pengguna layanan unit jual beli buah sawit ini yang dilakukan wawancara pada Tanggal 11 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB, beliau mengungkapkan bahwa :

“Kami selaku masyarakat desa sangat senang dengan adanya BUMDes. Dengan adanya BUMDes saya dapat menjual buah sawit saya dengan mudah dan dekat. Kalau dulu saya selalu ke pembuang untuk menjual menukar kwitansi saya dengan pengepul besar. Karena saya pengepul kecil, saya sangat senang dapat di bantu BUMDes karena harganya yang tinggi dibanding orang pembuang. Tapi sering kali ketika saya menjual sawit saya melalui BUMDes, dananya katanya kosong sehingga terpaksa saya tetap ke pembuang untuk menukar kwitansi saya”.

Dari wawancara di atas dengan Direktur BUMDes bahwa dari para pengurus telah menyiapkan beberapa langkah untuk dapat meningkatkan permodalan yaitu dari tabungan masyarakat. Namun untuk saat ini pengelolaan dana tabungan tersebut belum dilaksanakan karena masih menunggu aplikasi yang sedang disiapkan oleh pengurus BUMDes. Dengan adanya aplikasi komputer tersebut sangat diharapkan dapat mempermudah dalam hal pengelolaan dan pengawasan dari pengelolaan dana tabungan masyarakat

3) Unit Usaha Pembuatan Paving Block

Tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik melalui Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD) dalam UU N0. 6 Tahun 2014 adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Salah satu instrumen

penting dalam mewujudkan desa yang maju dan mandiri adalah dengan mendirikan BUMDes. BUMDes dapat dijadikan suatu wadah dalam memberdayakan masyarakat desa. Besarnya dana yang saat ini diterima masing-masing desa maka sangat diharapkan pemerintah desa dapat mengelola secara optimal dalam memberdayakan masyarakat dalam membangun desa. Berangkat dari hal tersebut, Pemerintah Desa Amin Jaya bersama BUMDes nya memiliki gagasan untuk membuat suatu unit usaha untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam membangun desa yang saat ini telah membentuk unit usaha Paving Block.

Unit usaha paving block ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat desa dan pemerintah daerah. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sarji (Tokoh Masyarakat Desa Amin Jaya) pada wawancara pada Tanggal 11 Oktober 2016 pukul 15.00 WIB, beliau mengungkapkan bahwa :

“Menurut kami pembuatan paving block sangat positif, karena selama ini di desa kami setiap tahun jalan terus-terusan rusak dan terus ditimbun tanah latrit. Setiap kali musim hujan tanah latrit tergerus oleh air hujan yang menyebabkan jalan menjadi becek. Seperti di Bojonegoro hampir setiap gang semua jalan sudah di pasang paving block, jadi jalan-jalan tidak lagi becek. Semoga paving ini kuat untuk waktu yang lama”.

Hal senada yang diungkapkan oleh Bapak Aliransyah Camat Pangkalan Banteng pada wawancara tanggal 9 Oktober 2016 :

“BUMDes di Amin Jaya terus melakukan inovasi berbagai unit usaha. Dan kami sangat menyambut positif dengan adanya pendirian pabrik paving block yang memiliki kekuatan beton K-400. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah desa dan BUMDesnya karena untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum ada pelaku usaha

yang membuat paving block sekuat itu. Dan apalagi dana desa yang sangat besar sekarang, maka tidak akan sulit untuk mencari pemasarannya”.

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa baik pemerintah daerah dan masyarakat di Desa Amin Jaya merasa senang dengan adanya kehadiran unit usaha ini. Sehingga dari konsep pemberdayaan masyarakat dalam membangun desa dapat terwujud melalui unit usaha ini. Namun demikian, dalam unit usaha ini masih terkendala dari sisi permodalan. Unit usaha ini mendapatkan permodalan sebesar 150 juta yang digunakan untuk pendirian pabriknya sebesar 120 juta, sedangkan untuk modal bahan baku dan tenaga kerja hanya 30 juta rupiah. Dengan modal yang minim tersebut sangat menghambat dari kemajuan unit usaha ini.

Unit usaha paving block ini baru saja beroperasi yang tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2016. Walaupun dengan usia yang sangat muda, kegiatan usaha ini sangat menjanjikan. Tercatat hanya baru berjalan sekitar 4 Bulan sudah mencatatkan laba sebesar 12 juta rupiah. Dengan segala keterbatasan dana yang ada selalu terus memproduksi paving block dengan rata-rata per hari 1.000 buah paving block. Dan para pembelinya selain dari pemerintah desa setempat juga dari perusahaan dan desa tetangga.

Tabel 4.7
Laporan Laba/Rugi BUMDes Karya Jaya Abadi
Per September 2016

| No. | Uraian Kegiatan | Jumlah (Rp) |
|-----|-----------------------------|----------------|
| 1 | Permodalan | |
| | - Unit Menjahit | 30.000.000 |
| | - Unit Jual Beli Buah Sawit | 170.000.000 |
| | - Unit Paving block | 150.000.000 |
| | Jumlah | 350.000.000 |
| 2 | Laba/Rugi | |
| | - Unit Menjahit | 6.000.000 |
| | - Unit Jual Beli Buah Sawit | 16.000.000 |
| | - Unit Paving block | 12.000.000 |
| | Jumlah | 34.000.000 |

Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan BUMDes sampai Bulan September 2016 telah mencatatkan laba sebesar 34 juta rupiah dengan permodalan sebesar 350 juta rupiah. Dan sampai saat ini unit usaha yang memperoleh laba terbesar adalah unit jual beli buah sawit yaitu sebesar 16 juta rupiah

3. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya

Dalam melakukan implementasi BUMDes secara efektif, pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah desa itu sendiri yang sangat berpengaruh dalam hal pengambil kebijakan. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya Abadi di Desa Amin Jaya, antara lain :

1) Faktor Pendukung

a) Potensi Desa Amin Jaya

Desa Amin Jaya yang wilayahnya dikelilingi oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) Perkebunan Kelapa Sawit sehingga mayoritas lahan yang berada di wilayah Desa Amin Jaya juga bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Pada umumnya masyarakat mengembangkan potensi perkebunan sebagai roda penggerak perekonomian keluarga.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Alman Riansyah selaku Kepala Desa Amin Jaya Pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Pada umumnya masyarakat di sini memiliki lahan yang merupakan lahan ex transmigrasi yaitu berupa Lahan Usaha 1 (LU 1) dan Lahan Usaha 2 (LU 2). Hampir keseluruhan LU 1 dan LU 2 yang dimiliki masyarakat ex transmigrasi saat ini di tanami dengan kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian mereka.”

Dengan mayoritas masyarakatnya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit maka hal ini sangat berpotensi bagi BUMDes untuk mengakomodir berbagai unit usaha yang salah unitnya telah berjalan adalah unit usaha jual beli kelapa sawit. Unit usaha ini merupakan salah satu bentuk usaha dari Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat yang selama ini merasa kesulitan dalam menjual hasil kebunnya ke Perusahaan. Desa Amin Jaya yang merupakan sebagian wilayahnya telah dikelola oleh masyarakatnya dengan perkebunan kelapa sawit, sehingga potensi di bidang pengadaan berbagai kebutuhan di bidang pertanian

atau perkebunan sangat tinggi apabila dikelola oleh BUMDes sebagai lembaga penyalur kebutuhan bagi masyarakat petani sawit.

Potensi Desa Amin Jaya selanjutnya adalah lokasi Desa Amin Jaya yang berada di jalur lalu lintas provinsi dan dikelilingi oleh 3 (tiga) perusahaan besar swasta. Desa Amin Jaya juga merupakan pusat perdagangan terbesar kedua yang berada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng sehingga unit usaha BUMDes dapat berkembang dengan baik dengan di topang adanya perusahaan serta lokasinya yang strategis.

Potensi Desa Amin Jaya lainnya adalah dengan adanya dana transfer ke desa yang cukup besar. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa Amin Jaya adalah sebesar Rp. 1.827.655.300. Dengan besarnya dana yang diterima oleh Pemerintah Desa maka Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk penyertaan modal kepada BUMDes serta Pemerintah Desa juga dapat menjadi konsumen dari produk yang telah dihasilkan oleh BUMDes nya itu sendiri. Seperti contoh dari pengelolaan paving blok yang memiliki kekuatan sebagai jalan lingkungan desa, sehingga desa dapat menganggarkan untuk peningkatan jalan lingkungan desa dengan membeli paving yang diproduksi oleh BUMDes. Sehingga dapat dikatakan unit usaha BUMDes dapat membantu Pemerintah Desa dalam hal mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan melalui unit usaha yang bergerak di bidang memproduksi

barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah desa yang dianggarkan melalui APBDes.

b) Peran Pemerintah Desa

Salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pengelolaan BUMDes adalah peran dari pemerintah desa sebagai monitoring dan mengevaluasi kinerja pengurus BUMDes. Proses monitoring dilakukan monitoring secara berkelanjutan sehingga dapat memantau kegiatan BUMDes secara baik. Dengan fungsi monitoring dan evaluasi ini juga, pemerintah desa bersama-sama masyarakat sama-sama ikut mengawasi jalannya pengelolaan BUMDes. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Hilman (Direktur BUMDes) pada wawancara pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 Pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa :

“Setiap awal bulan kami selalu melakukan pertemuan rutin bersama Kepala Desa dan juga BPD sebagai laporan kami terhadap pengelolaan unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes”.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Alman Riansyah selaku Kepala Desa Amin Jaya Pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan evaluasi kinerja dari pengurus BUMDes, kami beserta BPD dan pengurus BUMDes selalu menggelar pertemuan rutin bulanan untuk menerima laporan perkembangan BUMDes juga kendala-kendala yang dihadapi dari unit-unit usaha BUMDes. Dari situ kita membahas langkah-langkah BUMDes ke depan untuk dapat berkembang lebih baik lagi”.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa bersama Pengurus BUMDes selalu melakukan

pertemuan rutin bulanan untuk membahas sejauh mana perkembangan pengelolaan unit-unit usaha BUMDes Karya Jaya Abadi, dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pengurus. Selain itu pertemuan rutin juga digunakan oleh para pengurus dan pemerintah desa untuk melakukan koordinasi untuk membahas langkah-langkah ke depan untuk perkembangan unit usaha sehingga terkelola secara optimal.

Selain menjadi lembaga monitoring dan evaluasi dari kinerja pengurus BUMDes, peran pemerintah desa dalam memberikan dukungan penuh kepada lembaga ekonomi desa ini juga sangat dibutuhkan. Salah satu dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Amin Jaya dalam pengembangan usaha BUMDes Karya Jaya Abadi adalah terus menyuntikan permodalan setiap tahunnya kepada BUMDes.

Tabel 4.8

Permodalan BUMDes Yang Bersumber dari Pemerintah Desa Amin Jaya

| No. | Tahun | Modal (Rp) | Jumlah Modal (Rp) |
|-----|-------|-------------|-------------------|
| 1. | 2014 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 2. | 2015 | 170.000.000 | 200.000.000 |
| 3. | 2016 | 150.000.000 | 350.000.000 |

Sumber : BUMDes Karya Jaya Abadi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan permodalan BUMDes Karya Jaya Abadi setiap tahunnya terus mendapatkan penambahan permodalan yang bersumber dari Pemerintah Desa. Sampai saat ini jumlah dan yang diberikan oleh pemerintah desa sebagai modal BUMDes berjumlah 350 juta rupiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran dari pemerintah desa demi berkembangnya BUMDes sangat baik, selain dari memberikan permodalan juga terus memantau perkembangan usaha BUMDes yang sedang dijalankan.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan suatu alat pendukung dalam pengelolaan suatu usaha atau kebijakan yang sedang dijalankan, fasilitas operasional menjadi salah satu pendukung utama agar kebijakan atau usaha yang sedang dikembangkan dapat dikelola sesuai dengan baik. Dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa, para pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi sampai saat ini telah memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung untuk membantu aktivitas dalam menjalankan peran sebagai pengurus.

Walaupun sarana dan prasana yang dimiliki oleh lembaga ekonomi desa ini yang masih minim, namun keberadaan sarana dan prasana yang dimiliki tersebut dinilai telah menunjang kelancaran kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMdes seperti adanya Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi sampai dengan adanya perangkat pendukung lainnya seperti perangkat komputer, meja dan kursi, dll.

Berikut disajikan daftar inventaris yang dimiliki oleh BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya :

Tabel 4.9
Daftar Inventaris Barang BUMDes Karya Jaya Abadi
Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng

| No | Nama Barang | Jumlah | Keterangan |
|----|---------------|---------|-----------------|
| 1 | Kantor BUMDes | 1 Unit | Pemerintah Desa |
| 2 | Komputer | 1 Unit | Pemerintah Desa |
| 3 | Printer | 1 Unit | Pemerintah Desa |
| 4 | Meja | 5 unit | Pemerintah Desa |
| 5 | Kursi | 12 Unit | Pemerintah Desa |
| 6 | Kursi Tamu | 1 Unit | Pemerintah Desa |

Sumber : Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang dalam pelaksanaan pelaksanaan kegiatan usahanya yang salah satunya Kantor BUMDes sebagai pusat kegiatan dari berbagai unit usaha BUMDes. Sarana dan prasarana yang dimiliki BUMDes berasal dari pelimpahan aset Pemerintah Desa kepada BUMDes untuk menunjang kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus BUMDes.

2) Faktor Penghambat

- a) Rendahnya Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDes Karya Jaya Abadi

Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu faktor penghambat dari pengelolaan BUMDes Karya Jaya Abadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari para pengurus BUMDes tidak ada yang menempuh pendidikan sampai sarjana. Dengan rendahnya SDM dari para pengurus BUMDes maka sangat berdampak kepada kurangnya pemahaman dan kemampuan dalam tata kelola administrasi yang baik. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa bahwa untuk mengatasi rendahnya kemampuan yang dimiliki oleh pengurus BUMDes, maka pemerintah desa selalu mengikutsertakan para pengurus untuk mengikuti program Bimbingan Teknis yang diselenggarakan baik Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi.

b) Minimnya akses permodalan

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 4.8 bahwa permodalan BUMDes hanya berasal dari penyertaan modal pemerintah desa yang sangat terbatas nilainya. Dengan minimnya jumlah modal yang dimiliki, maka unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Karya Jaya Abadi ini tidak dapat berkembang secara pesat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Hilman selaku Direktur BUMDes Karya Jaya Abadi pada wawancara pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016, beliau mengatakan bahwa :

“Perkembangan dari unit usaha BUMDes sudah sangat baik. Namun kendala yang masih kami hadapi adalah terbatasnya jumlah modal yang kami miliki. Modal yang kami miliki masih terbatas modal dari pemerintah desa saja. Dari unit Jual Beli Sawit saja sebenarnya kami membutuhkan dana minimal 500 juta bahkan lebih untuk melayani masyarakat yang memiliki kebun, itupun sebenarnya masih kurang”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Alman Riansyah (Kepala Desa Amin Jaya) dalam wawancara pada tanggal 10 Oktober Pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan bahwa :

“BUMDes Karya Jaya Abadi sampai saat ini hanya mengandalkan pemerintah desa sebagai pemasok modal. Masih belum ada perhatian dari pemerintah daerah maupun lembaga perbankan untuk menambah permodalan bagi BUMDes. Namun begitu, perkembangan unit usaha sudah sesuai yang diharapkan”.

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes Karya Jaya Abadi dalam menjalankan berbagai unit usaha masih dengan mengandalkan modal yang disertakan oleh Pemerintah Desa sehingga menghambat perkembangan kemajuan unit usaha itu sendiri. Dari unit usaha jual beli buah sawit seperti yang disampaikan Direktur BUMDes bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait jual beli buah sawit sangat membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga diperlukan akses permodalan selain dari mengandalkan permodalan dari pemerintah desa.

C. Pembahasan

Banyak persepsi yang menganggap bahwa implementasi dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh para pengambil kebijakan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam realitanya, implementasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena suatu kebijakan yang sudah diambil tidak akan berarti apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. dengan kata lain implementasi merupakan suatu fase

dimana suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat memenuhi tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Dalam lingkup Pemerintah Desa Amin Jaya telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama BUMDes Karya Jaya Abadi yang saat ini telah diimplementasikan oleh para pengurus BUMDes sebagai pelaksana program kebijakan. Penulis menggunakan teori Grindle dalam melihat implementasi Peraturan Desa No. 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Abadi yang mengungkapkan ada dua variabel untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi kebijakan ini. Kedua variabel tersebut yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Berikut ini penulis akan mengulas mengenai implementasi kebijakan BUMDes Karya Jaya Abadi yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Desa Amin Jaya.

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Program kebijakan BUMDes merupakan salah satu program yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Amin Jaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan melalui berbagai usaha-usaha pendekatan terhadap masyarakat demi terwujudnya desa yang maju dan mandiri sesuai nafar UU desa. Dengan terbitnya kebijakan BUMDes ini pada awal tahun 2014 ini merupakan bukti nyata usaha dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Adapun konteks dari isi kerbujakan menurut Grindle adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.

Suatu kebijakan merupakan sebuah aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan berbagai pihak pada tahap implementasinya. Dalam kebijakan BUMDes ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa sebagai sasaran utama di dalam pembuatan kebijakan ini yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan ini adalah masyarakat. Hal ini dimana masyarakat menjadi penerima manfaat dari adanya kebijakan ini.

Salah satu contohnya penentuan dari unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Karya Jaya Abadi adalah unit usaha jual beli buah sawit dibentuk untuk membantu masyarakat dalam menjual hasil kebunnya yaitu buah sawit kepada pihak perusahaan dan langsung mendapatkan uang tunai tanpa harus menunggu pembayaran dari pihak perusahaan. Kemudian unit usaha menjahit dibentuk untuk membantu para pelaku usaha menjahit dalam menjalankan usahanya sebagai mitra usaha dalam menjalankan usaha yang sejenis. Kemudian untuk unit usaha pembuatan paving blok dibentuk untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para masyarakat Desa Amin Jaya.

b. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Setiap kebijakan tentunya merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan ditengah masyarakat.

Berdasarkan informasi yang telah didapat peneliti melalui data yang diperoleh, maka manfaat dari program BUMDes ini adalah sebagai berikut:

a) Menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa

Dengan hadirnya BUMDes di Desa Amin Jaya dengan membuka berbagai unit usaha di dalamnya maka secara langsung telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Seperti data yang telah diperoleh sampai saat ini BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki 6 orang pengurus dan 9 orang karyawan yang kesemuanya adalah warga desa setempat.

b) Dapat mengakomodir usaha perekonomian masyarakat desa

BUMDes Karya Jaya Abadi yang dimiliki oleh Desa Amin Jaya memiliki peranan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat desa. sebagai contoh adalah adanya unit usaha jual beli buah sawit telah membantu sebagian besar para pemilik kebun sawit untuk menjual hasil kebunnya ke pihak perusahaan walaupun tidak semua dapat terakomodir dikarenakan modal yang dimiliki unit usaha ini sangat

terbatas. Kemudian unit pembuatan paving blok juga telah membantu usaha masyarakat khususnya di bidang jasa angkutan dengan menyewa truk yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengangkut bahan baku pembuatan paving blok.

c) Mempercepat pembangunan desa

Manfaat lain dengan adanya BUMDes Karya Jaya Abadi adalah BUMDes merupakan unit usaha untuk menyuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa Amin Jaya untuk membangun desa yaitu salah satunya adalah paving blok. Paving blok merupakan salah satu bahan baku yang dibutuhkan dalam membangun desa khususnya pembangunan jalan desa dan selama ini paving blok untuk jalan selalu didatangkan dari pulau Jawa atau dengan kata lain masih belum ada usaha sejenis yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebelum Pemerintah Desa Amin Jaya dalam membangun jalan desa hanya mengandalkan tanah latrit. Maka dengan adanya paving blok ini sangat membantu bagi pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa karena pemerintah desa dapat memperoleh bahan baku untuk pembangunan jalan dari desanya sendiri tanpa harus mendatangkan paving tersebut dari luar.

d) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan PAD desa

Salah satu tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. dengan hadirnya BUMDes di tengah-tengah masyarakat sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat sehingga

pendapatan masyarakat desa juga akan meningkat. Salah satu contohnya adalah unit usaha jual beli buah sawit yang membantu para pemilik buah untuk menjual buahnya ke perusahaan. Dengan adanya unit usaha ini juga dapat menjaga harga buah agar tidak dipermainkan oleh para pelaku usaha sejenis agar tidak merugikan para pemilik kebun sawit dan masyarakat dapat memilih alternatif dari dua perusahaan yang sudah bekerja sama dengan BUMDes untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.

Salah satu tujuan dari pendirian BUMDes adalah untuk memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat BUMDes Karya Jaya Abadi telah memberikan kontribusi bagi PAD Amin Jaya pada tahun 2016 adalah sebesar 8 juta rupiah yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk melakukan pembiayaan pembangunan.

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Perubahan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan BUMDes ini adalah agar pemerintah desa dapat mengelola potensi ekonomi desanya, yang mana ini akan berdampak kepada pemasukan PAD desa serta peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pemasukan PAD desa dari sektor ini juga untuk mengurangi ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah untuk menjalankan program pembangunan. Dengan kemandirian desa inilah merupakan perubahan yang hendak dicapai sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes Karya Jaya Abadi terdiri dari berbagai unit usaha. Dengan masyarakat menggunakan jasa layanan yang dikelola oleh unit usaha BUMDes maka secara tidak langsung adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa karena keuntungan yang diperoleh oleh BUMDes akan berkontribusi terhadap peningkatan PAD Desa Amin Jaya. Dari berbagai unit usaha yang sedang di kelola BUMDes menunjukkan bahwa unit usaha itu terbentuk untuk mengelola berbagai potensi yang ada di desa.. Salah satu contoh yang dipaparkan di atas bahwa usaha menjahit dibentuk untuk membantu para penjahit yang berada di desa Amin Jaya yang merasa kesulitan dalam mencari tenaga kerja. Kemudian unit jual beli sawit dibentuk atas aspirasi masyarakat yang merasa kesulitan dalam menjual hasil kebunnya serta masyarakat petani kebun dapat menjual hasil kebunnya dengan harga yang bersaing karena adanya alternatif dari dua perusahaan sehingga pendapatan masyarakat pun akan menjadi meningkat serta para pengepul buah sawit usahanya juga akan meningkat. Begitu juga dengan unit paving block merupakan hasil dari penjarangan aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan kualitas jalan desa serta membantu pemerintah desa sebagai penyedia bahan baku dalam pembangunan jalan desa. Dengan adanya BUMDes ini maka sangat diharapkan membawa perubahan bagi pemerintah desa dalam mengelola potensi desa yang selama ini belum di kelola dengan baik demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dari paparan di atas, maka dapat disimpulkan derajat perubahan yang ingin dicapai, antara lain :

- a) Pemerintah desa dapat mengelola secara optimal potensi-potensi yang ada di desa.
- b) Adanya perubahan peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya demi mewujudkan desa yang maju dan mandiri.
- c) Adanya peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Pembuat kebijakan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu program kebijakan dalam pengimplementasiannya. Keberhasilan dari program BUMDes ini sangat ditentukan oleh komitmen dari pembuat kebijakan yang memberikan kewenangan kepada para pelaksana dan juga didukung dengan berbagai sumber daya yang ada baik itu sarana dan prasarana serta permodalan.

Bahwa dalam kebijakan BUMDes ini letak pengambilan keputusannya melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan juga tokoh masyarakat desa. Musyawarah desa juga merupakan tempat pengambilan keputusan dalam menentukan dan memilih para pengurus BUMDes serta kebijakan-kebijakan lainnya.

e. Pelaksana Program

Implementasi kebijakan harus didukung dari pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dalam menjalankan program kebijakan. Para pelaksana program ini adalah para pengurus BUMDes yang mana dipilih melalui mekanisme musyawarah desa dan dipilih dari warga desa yang dinilai memiliki kemampuan di bidang usaha karena merupakan salah satu

pelaku usaha yang sukses di Desa Amin Jaya. Dalam meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada para pengurus BUMDes. Salah satunya keikutsertaan pengurus BUMDes untuk mengikuti pelatihan dan studi banding dalam manajemen BUMDes. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa pengurus BUMDes telah mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus BUMDes baik dalam pengelolaan administrasi maupun bidang usaha yang dikelola oleh BUMDes seperti kegiatan studi banding di Desa Pongkok dan Beleberan Provinsi Yogyakarta, Bimtek Pengelolaan BUMDes di Palangka Raya oleh BPMD Provinsi Kalimantan Tengah dan kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes di Pangkalan Bun oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

f. Sumber Daya Yang Dikerahkan

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang didirikan berdasarkan adanya potensi ekonomi lokal, sehingga sumber daya menjadi sangat penting dalam keberhasilan kebijakan BUMDes ini. Berdasarkan data yang telah diuraikan bahwa unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes ini merupakan potensi desa yang selama ini belum tersentuh. BUMDes Karya Jaya Abadi juga telah mendapatkan permodalan yang cukup dalam pengembangan unit-unit usahanya. Walaupun dengan keterbatasan jumlah SDM yang memadai, para pengurus BUMDes terus mendapatkan bimbingan dan pelatihan dari berbagai stakeholder dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan administrasi BUMDes.

2. Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*)

a. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Yang Dimiliki Oleh Para Aktor Yang Telibat Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan selalu melibatkan aktor, yang mana intensitas keterlibatan tergantung dari seberapa besar kepentingan aktor tersebut dalam kebijakan. Penggerak dari pembentukan BUMDes di Desa Amin Jaya adalah Kepala Desa. Proses pembentukan BUMDes yang melalui musyawarah desa. Dalam implementasi kebijakan BUMDes, salah satu faktor yang menghambat hasil implementasi adalah adanya benturan kepentingan, karena setiap implementasi dari suatu kebijakan selalu melibatkan para aktor. Dari pelaksanaan unit-unit usaha BUMDes Karya Jaya Abadi ini dengan adanya kesamaan kepentingan antara pemerintah desa dengan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga ekonomi desa yang dapat mengelola potensi desa secara optimal untuk meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat.

Di awal pembentukan BUMDes yang merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat yaitu pengelolaan jalan kebun desa sehingga memudahkan para pemilik kebun sawit untuk mengeluarkan hasil kebunnya. Kemudian unit usaha lainnya yaitu unit jual beli buah sawit yang juga merupakan solusi dari permasalahan yang dihadapi para petani kebun sawit yang kesulitan menjual buah sawitnya dengan harga yang bersaing. Dengan adanya unit usaha BUMDes yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Amin Jaya bersama BPD dan elemen masyarakat atas dasar adanya kesamaan

kepentingan di dalamnya yaitu untuk meningkatkan usaha perekonomian di masyarakat desa.

b. Karakteristik Institusi Dan Rezim Yang Berkuasa

Karakteristik institusi tempat kebijakan diimplementasi juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Lembaga yang bersifat terbuka dengan berbagai kebijakan yang diterapkan akan mewujudkan tercapainya tujuan dari suatu kebijakan. Dalam menjalankan kebijakan BUMDes di Desa Amin Jaya yang merupakan lingkungan dari Desa Amin Jaya, Pemerintah Desa Amin Jaya terus terus memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha yang dikelola oleh BUMDes. Perhatian yang dilakukan antara lain pemberian penyertaan modal bagi BUMDes setiap tahunnya serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan unit usaha BUMDes secara berkesinambungan.

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana turut andil dalam keberhasilan dari suatu kebijakan. Dalam mewujudkan kepatuhan dalam pelaksana kebijakan, Pemerintah Desa Amin Jaya melakukan pendampingan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan program BUMDes ini. Kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan tidak akan terlaksana apabila tidak didukung peran serta dari masyarakat dan pemerintah desa. Dengan adanya evaluasi, maka pemerintah desa dapat mengawasi serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengurus BUMDes ini.

Para pengurus BUMDes sebagai pelaksana kebijakan melakukan kewajibannya yaitu melaporkan secara rutin melakukan laporan

perkembangan BUMDes setiap bulannya melalui pertemuan rutin bulanan yang dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD. Dengan adanya pertemuan rutin ini maka berbagai permasalahan dan perencanaan kedepan terhadap perkembangan BUMDes dapat dimusyawarah secara bersama-sama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam pelaksanaan penelitian tentang adanya Kebijakan BUMDes di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai dengan yang diharapkan karena telah memberikan kontribusi baik itu mempercepat pembangunan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta mengelola potensi lokal desa. Hal ini juga terlihat dari unit usaha yang telah dikelola BUMDes, keseluruhannya merupakan unit usaha yang dirikan melalui musyawarah desa yang telah menampung berbagai aspirasi masyarakat desa Amin Jaya. Walaupun demikian, ada salah satu unit usaha yang saat ini sudah tidak jalan lagi yaitu Pengelolaan Jalan Kebun Desa dikarenakan adanya konflik kepentingan dari warga yang merasa jalan yang dikelola merupakan hak pribadinya.
2. Adapun faktor –faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor Pendukung
 - a) Potensi Desa Amin Jaya.

Desa Amin Jaya memiliki potensi yang sangat baik terhadap perkembangan unit usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes,

diantaranya : wilayah Desa Amin Jaya yang dikelilingi oleh 3 perusahaan perkebunan kelapa sawit, mayoritas penduduknya bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, banyaknya area lahan masyarakat yang ditanami kelapa sawit, Desa Amin Jaya wilayahnya merupakan jalur lalu lintas provinsi, sebagai salah satu pusat perdagangan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng serta besarnya dana transfer yang diterima oleh Pemerintah Desa Amin Jaya.

b) Peran Pemerintah Desa

Adanya perhatian khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Amin Jaya dalam rangka mendukung perkembangan BUMDes Karya Jaya Abadi yaitu antara lain : mengevaluasi dan memonitoring secara berkala perkembangan BUMDes dan memberikan penyertaan modal kepada BUMDes setiap tahunnya.

c) Sarana dan Prasarana

BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang berasal dari Pemerintah Desa Amin Jaya, diantaranya : Gedung Kantor BUMDes, Peralatan Komputer, Meja, Kursi, Kipas Angin dan Kursi Tamu.

b. Faktor Penghambat

a) Rendahnya Tingkat Pendidikan Pengurus BUMDes

Dengan rendahnya tingkat pendidikan dari para pengurus BUMDes maka hal ini berpengaruh kepada rendahnya kemampuan dari para pengurus dalam hal pengelolaan administrasi. Sehingga diperlukan adanya pendampingan kepada para pengurus dalam hal pengelolaan

administrasi, seperti mengikuti kegiatan bimtek dan pelatihan terkait pengelolaan administrasi BUMDes.

b) Minimnya Akses Permodalan

BUMDes Karya Jaya Abadi sampai saat ini hanya mengandalkan dana yang bersumber dari pemerintah desa dalam mengelola unit usahanya sehingga menghambat dari perkembangan unit-unit usaha yang memerlukan pendanaan atau modal yang sangat besar seperti jual beli buah sawit dan pembuatan paving blok.

B. Saran

Mengacu dari berbagai kesimpulan hasil penelitian di atas, berikut disampaikan beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan berbagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan BUMDes di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

- 1) Kepada pemerintah desa yang memiliki peranan penting dalam pencapaian keberhasilan dari implementasi kebijakan BUMDes di Desa Amin Jaya untuk dapat terus konsisten dalam memberikan dorongan kepada para pengurus BUMDes lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dan selalu transparansi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat supaya terus menjalankan kebijakan BUMDes ini agar seluruh desa di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat mengelola berbagai potensi desanya sehingga

meningkatkan roda perekonomian desa. Serta memfokuskan melakukan pendampingan-pondampingan berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Syukur. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta : LAN.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Amirin, A.T. (2000). *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. (2010). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenama Media Group.
- Dunn, Wiliam N. (1999). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, J.S. (2004). *Implementasi Proyek Jalan dan Jembatan*, Tesis-S2. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Hosio, Jusach Eddy, (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi: Esai-esai dari Sorong*, (Cetakan Kedua), Yogyakarta: LaksBang.
- Huberman Michael, Miles Matthew and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Arizona State University.- Third edition
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. (2008). *Knowledge Management; Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media.
- Subarsono, Ag. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Andrianto (2007). *Manajemen Publik. Konsep, Aplikasi & Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Medpress.
- Widodo, Joko. (2001). *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (2007). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. KEPALA BPMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

1. Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa dan sampai saat ini berapa jumlah desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat telah membentuk BUMDes?
2. Apa yang mendasari adanya kebijakan BUMDes di masing-masing desa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Aturan / Kebijakan Pusat maupun Daerah)?
3. Bagaimana alur proses pembentukan atau pendirian BUMDes?
4. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BPMD dalam mensosialisasikan dari pembentukan serta pengelolaan BUMDes?
5. Bagaimanakah pengelolaan BUMDes yang telah terbentuk secara umum di Kotawaringin Barat?
6. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pengelolaan BUMDes yang telah berdiri ?

B. CAMAT PANGKALAN BANTENG

1. Bagaimana perkembangan BUMDes yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan agar BUMDes yang ada dapat berkembang dengan baik?
3. Bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan BUMDes yang ada di Desa Amin Jaya?
4. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pengelolaan BUMDes yang sudah berdiri?

C. KEPALA DESA AMIN JAYA

1. Bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Amin Jaya? Di lihat dari mata pencaharian dan pendapatannya.
2. Apa yang menjadi latar belakang berdirinya BUMDes Karya Jaya Abadi di Desa Amin Jaya?
2. Bagaimana alur proses pembentukan atau pendirian BUMDes di Desa Amin Jaya?

3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mendorong perkembangan BUMDes?
4. Apa yang menjadi dasar terbentuknya unit-unit usaha yang dikelola BUMDes?
5. Potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Amin Jaya dan telah dikelola oleh BUMDes?

D. DIREKTUR BUMDES KARYA JAYA ABADI

1. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengurus BUMDes?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDes di Desa Amin Jaya?
3. Bagaimana pengelolaan unit usaha yang dijalankan?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes?
5. Bagaimana peran Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mendorong perkembangan BUMDes?
6. Apakah pengurus BUMDes pernah mengikuti pelatihan atau semacamnya?
7. Bagaimana akses permodalan bagi BUMDes?

E. TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapat Bapak dengan berdirinya BUMDes di Desa Amin Jaya?
2. Bagaimana pendapat Bapak terhadap unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes?
3. Apakah dengan berdirinya unit usaha BUMDes saat ini telah berdampak positif terhadap perekonomian yang ada di masyarakat? khususnya bagi para pelaku usaha yang berhubungan dengan unit usaha yang dikelola.
4. Bagaimana masukan bapak terhadap pengelolaan unit usaha BUMDes Karya Jaya ABadi?

*Lampiran 2*TRANSKIP WAWANCARA I

Data Responden

Nama Narasumber : ROMHENDI, S.IP

Alamat dan No. Hp :

Tempat Wawancara : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat

Tanggal Wawancara : 07 Oktober 2016

Pewawancara : Sigit Imam Mulia

1. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Desa dan sampai saat ini berapa jumlah desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat telah membentuk BUMDes?

Jawaban : Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki desa untuk mengelola aset dan potensi desa. BUMDes ini diharapkan bukan menjadi pesaing bagi usaha masyarakat tapi lebih memberdayakan usaha yang ada di masyarakat. Di Kabupaten Kotawaringin Barat telah sampai saat ini telah terbentuk 51 BUMDes sejak tahun 2014.

2. Pertanyaan : Apa yang mendasari adanya kebijakan BUMDes di masing-masing desa di Kabupaten Kotawaringin Barat (Aturan / Kebijakan Pusat maupun Daerah)?

Jawaban : Sebenarnya BUMDes telah digaungkan sejak dulu yaitu pada UU 32 Tahun 2004 dan Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah mengeluarkan peraturan daerah No. 7 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa. Namun saat ini yang menjadi dasar Pemerintah Desa untuk membentuk lembaga ekonomi desa

yang dinamakan BUMDes adalah UU No. 6 Tentang Desa dan Permendes tahun 2015 sebagai petunjuk teknis pendirian dan pengelolaan BUMDes.

3. Pertanyaan : Bagaimana alur proses pembentukan atau pendirian BUMDes?
 Jawaban : Untuk alur proses pembentukan BUMDes ini melalui musyawarah desa/rembuk desa baik itu BPD, Tokoh Masyarakat maupun para pelaku usaha yang ada di desa. Dan hasil kesepakatan dari rembuk desa tersebut dituangkan ke dalam peraturan desa sebagai dasar pendirian BUMDes. Setelah itu baru menetapkan pengurusnya serta menyusun AD/ART BUMdes.
4. Pertanyaan : Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini BPMD dalam mensosialisasikan dari pembentukan serta pengelolaan BUMDes?
 Jawaban : Yang telah kami lakukan dalam pembinaan kepada pemerintah desa dalam hal BUMDes adalah dengan terus melakukan pendampingan kepada desa-desa dalam melakukan pembentukan BUMDes serta mendampingi desa dalam penyusunan AD/ART BUMdesnya. Namun terkait dengan jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes, Dalam melihat BUMDes sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat desa tentu tiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda, maka dari itu kami pemerintah mengeluarkan berbagai prasyarat indikator dalam hal pengajuan potensi untuk dijadikan sebagai unit usaha yang akan dikelola Badan Usaha Milik Desa. Kemudian masing-masing desa dapat menganggarkan penyertaan modal awal BUMDes sebesar 20% dari APBDes dan 10% untuk tahun-tahun berikutnya. Kebijakan ini dapat dijadikan rangsangan bagi para pengurus BUMDes untuk dapat mengoptimalkan kegiatan usahanya.
5. Pertanyaan : Bagaimanakah pengelolaan BUMDes yang telah terbentuk secara umum d Kotawaringin Barat?

Jawaban : Pada Tahun 2014 BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya merupakan salah satu BUMDes di Kotawaringin Barat yang dijadikan BUMDes percontohan dan sampai saat ini dari sekian BUMDes percontohan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat BUMDes Karya Jaya Abadi perkembangan jenis usaha yang berkembang dengan cukup baik, sedangkan BUMDes percontohan lain seperti BUMDes Pangkalan Satu di Desa Pangkalan Satu Kecamatan Kumai, BUMDes Karya Makmur di Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada, BUMDes Mua Sejahtera di Kecamatan Arut Utara masih terlihat aktifitas usaha yang dijalankan. Namun sampai saat ini dari 81 Desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat ada 51 Desa yang telah membentuk BUMDes dan target di tahun 2017 terbentuknya BUMDes di seluruh desa Kotawaringin Barat. Dan sampai saat ini hanya 16 BUMDes yang telah membentuk kepengurusan atau pengurus BUMDes

6. Pertanyaan : Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pengelolaan BUMDes yang telah berdiri ?

Jawaban : Menurut pengamatan kami di lapangan yang menjadi penghambat dari perkembangan BUMDes itu bermacam-macam, tergantung permasalahan yang ada di desa. Misalkan ada Kepala Desa yang tidak respon terhadap BUMDes, sulitnya mencari orang-orang untuk menjadi pengurus BUMDes karena menuntut penghasilan yang tinggi padahal usaha saja belum dijalankan.

TRANSKIP WAWANCARA II

Data Responden

Nama Narasumber : Drs. ALIRANSYAH
Alamat dan No. Hp :
Tempat Wawancara : Kantor Camat Pangkalan Banteng
Tanggal Wawancara : 09 Oktober 2016
Pewawancara : Sigit Imam Mulia

1. Pertanyaan : Bagaimana perkembangan BUMDes yang berada di Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng?

Jawaban : Kecamatan Pangkalan Banteng yang terdiri dari 17 Desa. Hanya 3 desa yang belum mendirikan BUMDes yaitu Desa Pangkalan Banteng, Desa Mulya Jadi dan Desa Natai Kerbau. Dari 14 BUMDes yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng BUMDes yang sangat aktif hanya BUMDes Karya Jaya Abadi di Desa Amin Jaya. Sedangkan BUMDes lainnya belum menjalankan unit usahanya. Tapi tahun ini ada beberapa desa yang telah menganggarkan permodalan bagi BUMDesnya. Dengan permodalan ini diharapkan menjadi pemacu dalam perkembangan BUMDes yang ada.

2. Pertanyaan : Apa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan agar BUMDes yang ada dapat berkembang dengan baik?

Jawaban : Upaya yang telah kami lakukan terhadap perkembangan BUMDes di Wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng adalah dengan mendorong setiap desa yang mendirikan BUMDes kemudian melakukan penyertaan modal bagi BUMDesnya. Untuk tahun 2015 hanya Desa Amin Jaya yang menganggarkan penyertaan modal bagi BUMDesnya, sedangkan tahun 2016 ini banyak desa yang

menganggarkannya seperti Desa Karang Sari, Desa Sungai Kuning dan Desa Sungai Pakit. Kami juga telah mencanangkan program kerjasama antar BUMDes yang mana nanti akan difasilitasi oleh pihak kecamatan.

3. **Pertanyaan** : Bagaimana menurut Bapak tentang perkembangan BUMDes yang ada di Desa Amin Jaya?

Jawaban : BUMDes di Amin Jaya terus melakukan inovasi berbagai unit usaha. Dan kami sangat menyambut positif dengan adanya pendirian pabrik paving block yang memiliki kekuatan beton K-400. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah desa dan BUMDesnya karena untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum ada pelaku usaha yang membuat paving block sekuat itu. Dan apalagi dana desa yang sangat besar sekarang, maka tidak akan sulit untuk mencari pemasarannya. BUMDes di Amin Jaya terus melakukan inovasi berbagai unit usaha. Dan kami sangat menyambut positif dengan adanya pendirian pabrik paving block yang memiliki kekuatan beton K-400. Ini merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah desa dan BUMDesnya karena untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum ada pelaku usaha yang membuat paving block sekuat itu. Dan apalagi dana desa yang sangat besar sekarang, maka tidak akan sulit untuk mencari pemasarannya.

4. **Pertanyaan** : Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dari pengelolaan BUMDes yang sudah berdiri?

Jawaban : Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes, menurut saya masih terkendala dengan SDM yang ada di desa. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga sulitnya mencari untuk menjadi pengurus BUMDes. Jangankan menjadi pengurus BUMDes dengan gaji yang masih kecil, mencari orang untuk menjadi perangkat desa sesuai dengan tingkat keahlian yang diharapkan pun sangat sulit.

TRANSKIP WAWANCARA III

Data Responden

Nama Narasumber : ALMAN RIANSYAH
Alamat dan No. Hp :
Tempat Wawancara : Kantor Desa Amin Jaya
Tanggal Wawancara : 10 Oktober 2016
Pewawancara : Sigit Imam Mulia

1. Pertanyaan : Bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Desa Amin Jaya?
Di lihat dari mata pencaharian dan pendapatannya.

Jawaban : Pada umumnya masyarakat di sini memiliki lahan yang merupakan lahan ex transmigrasi yaitu berupa Lahan Usaha 1 (LU 1) dan Lahan Usaha 2 (LU 2). Hampir keseluruhan LU 1 dan LU 2 yang dimiliki masyarakat ex transmigrasi saat ini di tanami dengan kelapa sawit sebagai sumber mata pencaharian mereka.

2. Pertanyaan : Apa yang menjadi latar belakang berdirinya BUMDes Karya Jaya Abadi di Desa Amin Jaya?

Jawaban : Kebijakan pendirian BUMDes Karya Jaya Abadi awalnya hanya sebatas hasil dari musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat masih belum tertuang di Peraturan Desa Amin Jaya dan pada saat itu musyawarah dilaksanakan hanya semata-mata untuk mengakomodir keluhan dari para petani kebun sawit yang jalan mereka lintasi rusak parah karena pemahaman kami pada saat itu tentang BUMDes masih awam. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2014 kami melakukan musyawarah desa kembali sebagai syarat pendirian BUMDes

dengan difasilitasi oleh Bapak Romhendi dari BPMD untuk menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes Karya Jaya Abadi beserta AD/ART nya. Awalnya pengelolaan jalan kebun tersebut sangat menguntungkan. Namun saat ini unit pengelolaan jalan kebun desa sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan pada pertengahan tahun 2015 adanya klaim lahan yang dilakukan masyarakat lokal yang merasa jalan tersebut adalah miliknya sebagai pengelola jalan tersebut. Untuk menghindari konflik maka kami putuskan agar pengelolaan jalan tersebut tidak dikelola oleh BUMDes lagi.

3. Pertanyaan : Bagaimana alur proses pembentukan pengurus BUMDes di Desa Amin Jaya?

Jawaban : Pada saat itu pembentukan pengurus BUMDes kita laksanakan dengan musyawarah desa yang juga bertepatan dengan musyawarah desa untuk membentuk BUMDes Amin Jaya yang juga dihadiri oleh Bapak Romhendi dari BPMD sebagai pendamping. Sebelumnya kami telah menyiapkan daftar nama calon pengurus untuk dipilih dalam forum. Calon pengurus yang kami ajukan merupakan warga Desa Amin Jaya yang juga merupakan para pengusaha sukses dan kami nilai memiliki semangat untuk membantu pemerintah desa dalam membangun desa karena mereka yang kami calonkan juga aktif dalam berbagai organisasi yang ada di desa. Setelah disepakati di musdes maka para calon pengurus terpilih kami tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Amin Jaya.

4. Pertanyaan : Bagaimana upaya Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mendorong perkembangan BUMDes?

Jawaban : Para pengurus BUMDes sering mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam tata kelola administrasi BUMDes, kami juga selalu mengikutsertakan mereka untuk mengikuti program pelatihan dalam rangka menyusun perencanaan

dan administrasi baik yang dilakukan oleh BPMD Kabupaten maupun Provinsi. Dalam melakukan evaluasi kinerja dari pengurus BUMDes, kami beserta BPD dan pengurus BUMDes selalu menggelar pertemuan rutin bulanan untuk menerima laporan perkembangan BUMDes juga kendala-kendala yang dihadapi dari unit-unit usaha BUMDes. Dari situ kita membahas langkah-langkah BUMDes ke depan untuk dapat berkembang lebih baik lagi. BUMDes Karya Jaya Abadi sampai saat ini hanya mengandalkan pemerintah desa sebagai pemasok modal. Masih belum ada perhatian dari pemerintah daerah maupun lembaga perbankan untuk menambah permodalan bagi BUMDes. Namun begitu, perkembangan unit usaha sudah sesuai yang diharapkan.

5. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi dasar terbentuknya unit-unit usaha yang dikelola BUMDes?

Jawaban : Dasar terbentuknya unit usaha yang dikelola oleh BUMDes selama ini berdasarkan atas hasil pengajuan yang dilakukan oleh para pengurus yang dibahas melalui musyawarah desa sehingga hasilnya menjadikan acuan bagi kami untuk menganggarkan penyertaan modal bagi BUMDes.

6. **Pertanyaan** : Bagaimana kontribusi BUMDes Karya Jaya Abadi bagi PAD Desa Amin Jaya?

Jawaban : Kontribusi BUMDes untuk PAD Desa Amin Jaya berdasarkan AD/ART yang dibuat adalah sebesar 40%. Untuk bagi hasil tahun 2015 yang disetorkan ke PAD Desa adalah sebesar 8 juta rupiah.

7. **Pertanyaan** : Potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Amin Jaya dan telah dikelola oleh BUMDes?

Jawaban : Potensi yang dimiliki Desa Amin Jaya antara lain perkebunan karena masyarakat di sini mayoritas bergerak di perkebunan kelapa sawit dan juga adanya 3 perusahaan besar swasta yang berada di wilayah desa Amin Jaya. Selain itu perdagangan juga salah satu potensi yang kami miliki, karena Desa Amin Jaya yang terletak di

jalur lintas provinsi serta pusat perdagangan yang ada di wilayah kecamatan Pangkalan Banteng setelah pasar Karang Mulya. Kemudian adanya kelompok ibu-ibu yang menghasilkan produk jajanan yang saat ini sudah dikenal sampai ke pulau jawa yaitu produk emping singkong dan belinjo nya.



TRANSKIP WAWANCARA IV

Data Responden

Nama Narasumber : HILMAN
Alamat dan No. Hp :
Tempat Wawancara : Kantor BUMDes Karya Jaya ABadi
Tanggal Wawancara : 11 Oktober 2016
Pewawancara : Sigit Imam Mulia

1. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi pengurus BUMDes?
Jawaban : Kami dari para pengurus BUMDes menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan AD/ART BUMdes Karya Jaya Abadi. Saya selaku Direktur BUMDes dengan dibantu staf keuangan beserta kepala unit usaha melakukan pengelolaan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
2. **Pertanyaan** : Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDes di Desa Amin Jaya?
Jawaban : Tanggapan masyarakat terhadap adanya pendirian BUMDes di Desa Amin Jaya sangat beragam. Ada masyarakat yang menyambut baik serta ada pula masyarakat yang mengungkapkan perkataan tidak baik karena dianggap tidak ada untungnya dan anggaran desa mending untuk kegiatan pembangunan desa.
3. **Pertanyaan** : Bagaimana pengelolaan unit usaha yang dijalankan?
Jawaban : Sampai saat ini BUMDes Karya Jaya Abadi telah memiliki 4 unit usaha yaitu pengelolaan jalan kebun masyarakat, Jual beli buah sawit, pembuatan paving blok dan menjahit. Tapi unit pengelolaan jalan kebun masyarakat saat ini sudah tidak berjalan lagi karena adanya klaim lahan dari masyarakat terhadap jalan yang kita kelola.

Perkembangan dari setiap unit sudah lumayan berkembang. Sesuai dengan laporan sampai bulan September 2016 ke Pemerintah Desa keuntungan dari ketiga unit usaha ini lumayan besar dibandingkan tahun lalu. Keuntungan yang telah di diterima BUMDes dari para Kepala Unit sudah tercatat 34 juta, yang terdiri dari 6 juta dari unit menjahit, 16 juta dari unit jual beli kelapa sawit dan 12 juta dari unit paving block.

4. Pertanyaan : Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes?
 Jawaban : Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sudah baik. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menjual hasil kebunnya melalui unit jual beli buah sawit namun karena permodalan kita kurang sehingga masih banyak masyarakat yang memiliki kebun yang belum dapat terakomodir.
5. Pertanyaan : Bagaimana peran Pemerintah Desa Amin Jaya dalam mendorong perkembangan BUMDes?
 Jawaban : Setiap awal bulan kami selalu melakukan pertemuan rutin bersama Kepala Desa dan juga BPD sebagai laporan kami terhadap pengelolaan unit usaha yang dilaksanakan oleh BUMDes. Pemerintah Desa juga terus memberikan dorongan kepada kami untuk terus berkarya membangun desa dengan memberikan permodalan bagi kami yang nilainya cukup besar sehingga kami merasa terdorong membayar kepercayaan Kepala Desa untuk mengembangkan unit-unit usaha yang kami kelola.
6. Pertanyaan : Apakah pengurus BUMDes pernah mengikuti pelatihan atau semacamnya?
 Jawaban : Setiap tahun kami terus mengikuti pelatihan maupun Bimtek yang dilaksanakan baik oleh provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya bimtek atau semacamnya dapat meningkatkan kemampuan bagi kami dalam melakukan pengelolaan administrasi maupun pengelolaan usaha-usaha yang kami jalankan.

7. **Pertanyaan** : Bagaimana Kontribusi BUMDes Karya Jaya Abadi bagi PAD Desa Amin Jaya?
- Jawaban** : Pembagian Sisa laba hasil usaha BUMDes pada tahun 2014 berdasarkan musyawarah dengan kepala beserta tokoh masyarakat karena laba BUMDes yang masih sedikit yaitu hanya 8 juta rupiah maka disepakati pembagiannya di pending dan dihitung pada di tahun 2015. Dan di tahun 2015 laba hasil usaha BUMDes adalah 12 juta dan ditambah dengan tahun sebelumnya menjadi 20 juta rupiah. Pembagiannya berdasarkan persentase AD/ART BUMDes.
8. **Pertanyaan** : Bagaimana akses permodalan bagi BUMDes?
- Jawaban** : Perkembangan dari unit usaha BUMDes sudah sangat baik. Namun kendala yang masih kami hadapi adalah terbatasnya jumlah modal yang kami miliki. Modal yang kami miliki masih terbatas modal dari pemerintah desa saja. Dari unit Jual Beli Sawit saja sebenarnya kami membutuhkan dana minimal 500 juta bahkan lebih untuk melayani masyarakat yang memiliki kebun, itupun sebenarnya masih kurang. Sedangkan permodalan bagi perbankan masih belum kita dapatkan karena terkendala badan hukum yang kita miliki dan juga persyaratan lain seperti agunan, dsb. Contohnya untuk pengelolaan unit usaha Jual Beli Buah Sawit kami masih mengandalkan permodalan dari Pemerintah Desa sebesar 170 juta. Sesuai dengan data bahwa pendapatan dari unit ini sebesar 16 juta rupiah. Dari jumlah modal yang kami kelola ini masih sangat minim dapat banyak para pemilik buah sawit yang tidak terlayani oleh kami. Sedangkan dana investasi masyarakat sampai saat ini masih belum kami laksanakan dikarenakan untuk investasi masyarakat ini akan kami buka di tahun depan karena saat ini kami masih fokus menyiapkan aplikasi untuk investasi/tabungan masyarakat sehingga dapat lebih mudah dikontrol dan diawasi.

TRANSKIP WAWANCARA V

Data Responden

Nama Narasumber : SARJI
Alamat dan No. Hp :
Tempat Wawancara : Rumah Masyarakat
Tanggal Wawancara : 11 Oktober 2016
Pewawancara : Sigit Imam Mulia

1. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak dengan berdirinya BUMDes di Desa Amin Jaya?

Jawaban : Kami selaku masyarakat desa sangat senang dengan adanya BUMDes. Dengan adanya BUMDes saya dapat menjual buah sawit saya dengan mudah dan dekat. Kalau dulu saya selalu ke pembuang untuk menjual menukar kwitansi saya dengan pengepul besar. Karena saya pengepul kecil, saya sangat senang dapat di bantu BUMDes karena harganya yang tinggi dibanding orang pembuang. Tapi sering kali ketika saya menjual sawit saya melalui BUMDes, dananya katanya kosong sehingga terpaksa saya tetap ke pembuang untuk menukar kwitansi saya.

2. Pertanyaan : Bagaimana pendapat Bapak terhadap unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes?

Jawaban : Menurut saya unit usaha BUMDes di Amin Jaya telah membantu masyarakat khususnya dalam menambah lapangan pekerjaan yang ada di Desa Amin Jaya. Ada beberapa warga kami yang sebelumnya hanya buruh serabutan sekarang bekerja di pembuatan paving di BUMDes Amin Jaya. Menurut kami pembuatan paving block sangat positif, karena selama ini di desa kami setiap tahun

jalan terus-terusan rusak dan terus ditimbun tanah latrit. Setiap kali musim hujan tanah latrit tergerus oleh air hujan yang menyebabkan jalan menjadi becek. Seperti di Bojonegoro hampir setiap gang semua jalan sudah di pasang paving block, jadi jalan-jalan tidak lagi becek. Semoga paving ini kuat untuk waktu yang lama.

3. **Pertanyaan** : Apakah dengan berdirinya unit usaha BUMDes saat ini telah berdampak positif terhadap perekonomian yang ada di masyarakat? khususnya bagi para pelaku usaha yang berhubungan dengan unit usaha yang dikelola.

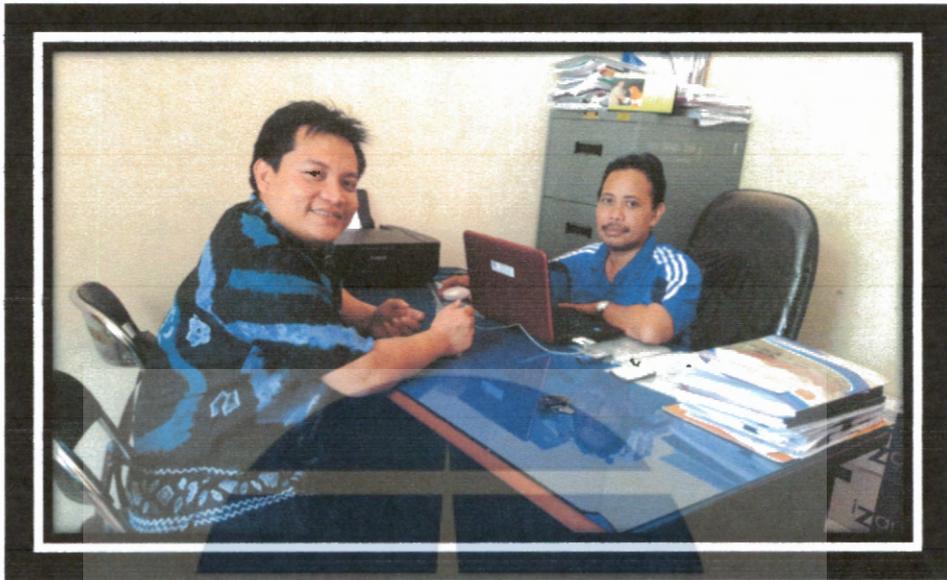
Jawaban : Adanya jual beli sawit ini sangat positif bagi warga masyarakat desa amin jaya. Karena masyarakat disini mayoritas memiliki perkebunan kelapa sawit, sehingga kami tidak perlu jauh dan lama untuk mendapatkan hasil dari penjualan buah sawit kami.

4. **Pertanyaan** : Bagaimana masukan bapak terhadap pengelolaan unit usaha BUMDes Karya Jaya ABadi?

Jawaban : Masukan saya kepada BUMDes dan pemerintah desa agar terus meningkatkan jenis usaha yang di kelola oleh BUMDes serta permodalannya. Karena saya masih sering tidak dapat menukarkan replace saya (Kwitansi) ke BUMDes karena katanya uangnya habis.



DOKUMENTASI WAWANCARA



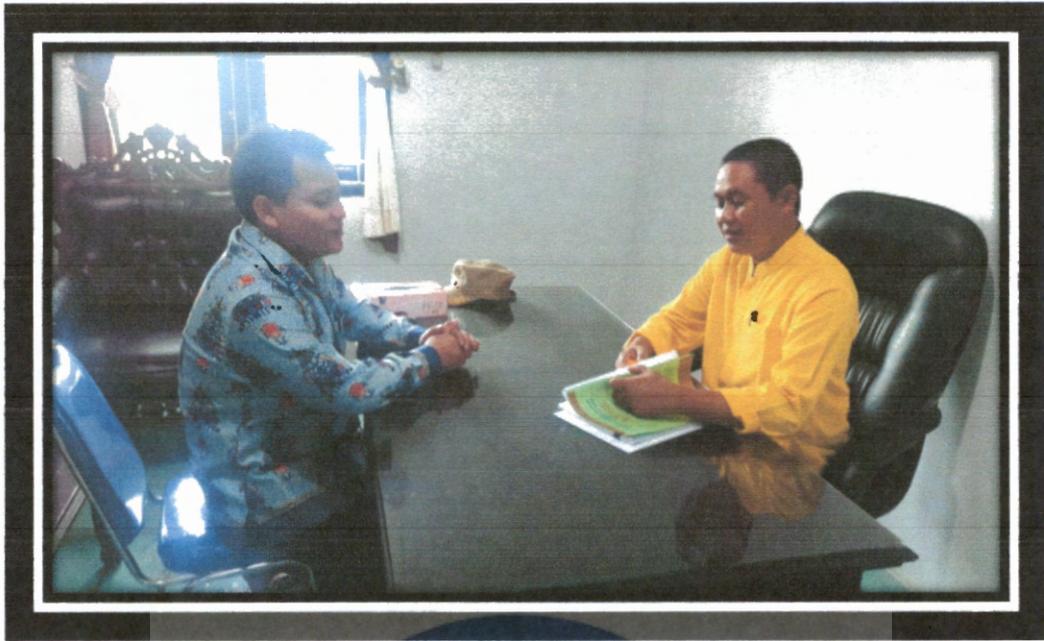
Gambar 1

**Wawancara Dengan Kepala Bidang UEM Badan Pemberdayaan Masyarakat
Desa Kabupaten Kotawaringin Barat
(Bapak Romhendi, S.IP)**



Gambar 2

**Wawancara Dengan Camat Pangkalan Banteng
Kabupaten Kotawaringin Barat
(Bapak Drs. Aliransyah)**



Gambar 3

**Wawancara Dengan Kepala Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
Kabupaten Kotawaringin Barat
(Bapak Alman Riansyah)**



Gambar 4

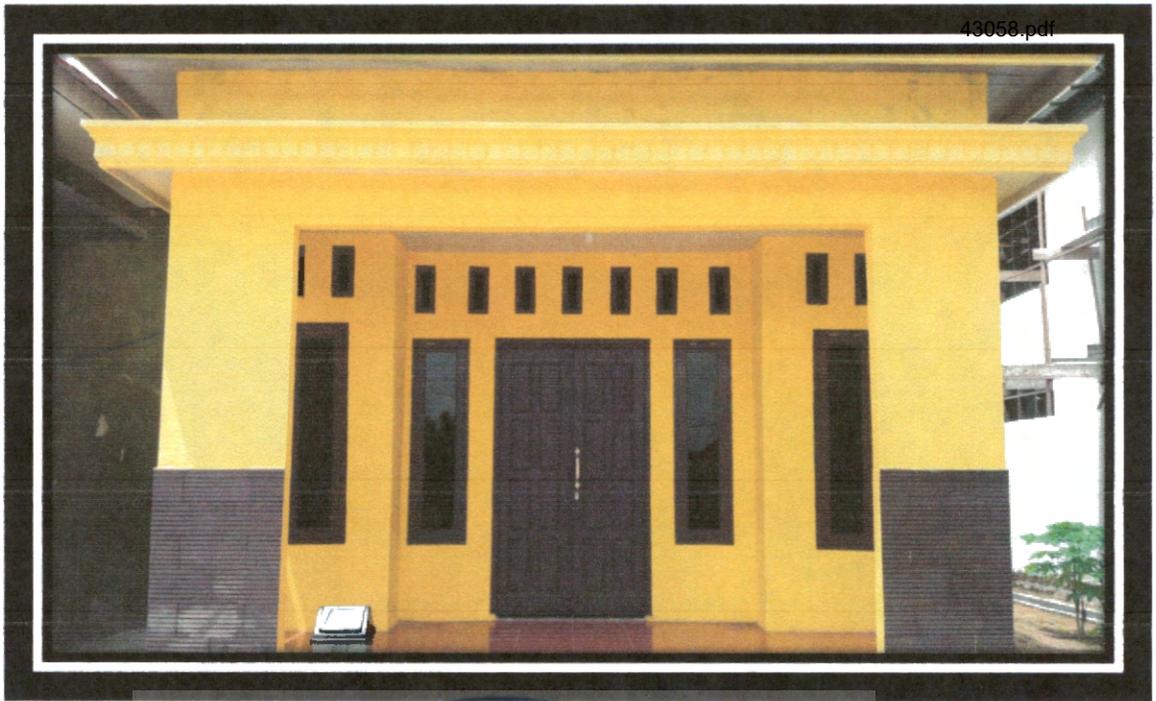
**Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Amin Jaya
(Bapak Sarji)**



Gambar 5
Gambar Transaksi Jual Beli Buah Sawit



Gambar 6
Papan Nama Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi



Gambar 7
Gambar Kantor BUMDes Karya Jaya Abadi



Gambar 8
Lokasi Pabri Pembuatan Paving Blok



Gambar 9

Gambar Buah Sawit Diangkut Menuju Perusahaan



Gambar 10

Gambar Paving Blok Yang Siap Di Pasang



Gambar 11
Karyawan BUMdes Unit Menjahit



Gambar 12
Mitra BUMDes

Lampiran 4

DATA BUMDes DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| No | Kecamatan | Desa | Nama Bumdes | Tanggal Berdiri |
|----|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Arut Selatan | Runtu | Arut Sejahtera | 25-10- 2014 |
| | | Umpang | Umpang Sejati | 08-04- 2015 |
| | | Kumpai Batu Bawah | Sumber Rejeki | 06-09- 2015 |
| | | Sulung | Adiman Sejahtera | 06-02-2016 |
| | | Tanjung Terantang | Tanjung Rejeki | 22-02-2016 |
| | | Kumpai Batu Atas | Mekar Berseri | 24-05-2016 |
| | | Natai Raya | Bina Usaha | 27-05-2016 |
| | | Natai Baru | Usaha Bersama | 30-05-2016 |
| | | Pasir Panjang | Lamantuha Sejahtera Bersama | 20-07-2016 |
| | Kumai | Pangkalan Satu | Pangkalan Satu | 07-10-2014 |
| | | Kubu | Kubu Jaya bersatu | 31-10-2015 |
| | | Sabuai | Sabuai Jaya Lestari | 21-11-2015 |
| | | Batu Belaman | Karya Bersama | 30-12-2015 |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| | | Sungai Kapitan | Kapitan Maju Jaya | 03-06-2016 |
| | | Teluk Bogam | Bogam Jaya Sejahtera | 19-07-2016 |
| | | Sabuai Timur | Mina Sebogor Lestari | 21-07-2016 |
| | | Bumi Harjo | Bumiharjo Mandiri Asri | 22-07-2016 |
| | | Sungai Sekonyer | Sekonyer Mandiri | 27-09-2016 |
| | Kotawaringin Lama | Riam Durian | Riam Sejahtera | 09-10- 2014 |
| | | Dawak | Harapan Karya Mandiri | 31-03-2015 |
| | | Sumber Mukti | Sumber Rejeki | 13-06- 2015 |
| | | Ipuh Bangun Jaya | Bangun Jaya Lestari | 17-12-2015 |
| | Arut Utara | Nanga Mua | Mua Sejahtera | 07-10- 2014 |
| | | Panahan | Sepakat | 25-04- 2015 |
| | | Kerabu | Kerabu Jaya | 13-07-2016 |
| | | Gandis | Kecubung utama Sejahtera | 15-07-2016 |
| | | Penyombaan | Kartamulya Sejahtera | 05-08-2016 |
| | | Sambi | Karya Bersama | 29-09-2016 |

| | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| Pangkalan Lada | Pangkalan Tiga | Karya Makmur | 28-10- 2014 |
| | Pangkalan Durin | Manfaat | 21-05- 2015 |
| | Sungai Melawen | Melawen Sejahtera | 15-08- 2015 |
| | Sungai Rangit Jaya | Usaha Mandiri | 20-09- 2015 |
| | Sumber Agung | Sumber Sejahtera | 28-12-2015 |
| | Pandu Senjaya | Pandu Sejahtera | 31-12-2015 |
| | Purbasari | Karya Bersama | 31-05-2016 |
| | Lada Mandala Jaya | Karya Mandala Makmur | 01-06-2016 |
| | Kadipi Atas | Kadipi Jaya | 02-06-2016 |
| Pangkalan Banteng | Amin Jaya | Karya Jaya Abadi | 01-03- 2014 |
| | Karang Mulya | Karya Mandiri | 29-10- 2015 |
| | Marga Mulya | Mandiri | 30-10-2015 |
| | Simpang Berambai | Bumi Mulya | 05-11-2015 |
| | Sungai Bengkuang | Harapan Makmur | 15-11-2015 |
| | Berambai Makmur | Sumber Makmur | 02-12-2015 |
| | Sungai Kuning | Makmur Sejahtera | 03-12-2015 |

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|------------|
| | Arga Mulya | Manunggal Jaya | 20-07-2016 |
| | Sungai Pakit | Sumber Agung | 25-07-2016 |
| | Sido Mulyo | Sejahtera Mulia | 27-07-2016 |
| | Kebun Agung | Tirta Agung Sejahtera | 09-09-2016 |
| | Sungai Hijau | Permata Hijau | 15-09-2016 |
| | Karang Sari | Karang Jaya | 19-09-2016 |
| | Sungai Pulau | Karya Trans Abadi | 20-09-2016 |

